

**ANALISIS PENGARUH *CORPORATE GOVERNANCE* DAN
CAPITAL INTENSITY TERHADAP TAX AVOIDANCE PADA
PERUSAHAAN SEKTOR ENERGI**



SKRIPSI

Oleh:

Nama: Diandra Rosiana Latifah
No. Mahasiswa: 20312352

**FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2025

HALAMAN JUDUL

ANALISIS PENGARUH *CORPORATE GOVERNANCE* DAN *CAPITAL INTENSITY* TERHADAP *TAX AVOIDANCE* PADA PERUSAHAAN SEKTOR ENERGI

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk mencapai derajat Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika UII

Oleh :

Nama : Diandra Rosiana Latifah

No. Mahasiswa : 20312352

FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2025

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sangsi apapun sesuai peraturan yang berlaku.”

Yogyakarta, 19 Agustus 2025

Penulis,



Diandra Rosiana Latifah

HALAMAN PENGESAHAN

ANALISIS PENGARUH *CORPORATE GOVERNANCE* DAN *CAPITAL INTENSITY* TERHADAP *TAX AVOIDANCE* PADA PERUSAHAAN SEKTOR ENERGI

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

Nama: Diandra Rosiana Latifah

No. Mahasiswa: 20312352

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal, 19 Agustus 2025

Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Kinanthi', with a large, stylized initial 'K' and a smaller 'P'.

(Kinanthi Putri Ardiami, SE., Akt., M.Ak..)

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

**ANALISIS PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE DAN CAPITAL INTENSITY TERHADAP TAX
AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN SEKTOR ENERGI**

Disusun oleh : DIANDRA ROSIANA LATIFAH

Nomor Mahasiswa : 20312352

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus
pada hari, tanggal: Rabu, 03 September 2025

Penguji/Pembimbing Skripsi : Kinanthi Putri Ardiami, SE., Ak., M.Ak.

Penguji : Reny Lia Riantika, SE., M.Acc.

Mengetahui
Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia



Prof. Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D., CFA, CertIPSAS.

MOTTO

Langsung lompat! “Semakin lama kita berpikir, semakin sulit untuk melakukannya. Terlalu lama berpikir hanya memicu kecemasan dan keraguan. Stop bertanya, Bagaimana jika begini atau begitu?”.

(Haemin Sunim)

“Selalu ada harga dalam sebuah proses. Maka nikmati saja lelah-lelah itu. Perluas lagi rasa sabar itu. Semua yang kau investasikan untuk menjadikan dirimu serupa yang kau impikan menjadikan dirimu serupa yang kau impikan, mungkin tidak akan selalu berjalan lancar. Tapi gelombang-gelombang itu yang nanti akan bisa kau ceritakan”.

-Boy Candra-

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin, Puji syukur kami panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga Tugas Akhir ini penulis dapat menyelesaikan dengan baik. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan atas junjungan kita Nabi Muhammad S.A.W, sahabat serta pengikutnya dengan judul “Analisis Pengaruh *Corporate Governance dan Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Sektor Energi”. Skripsi ini disusun menjadi syarat upaya menyelesaikan Pendidikan gelar Sarjana (S-1) pada Program Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.

Penyusunan skripsi berdasarkan ini tidak lepas tanpa adanya dukungan, bantuan, semangat dan doa dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Allah SWT yang sudah memberikan rahmat serta hidayah dan meridai setiap jalan yang dilalui dan memberikan semua kemudahan rintangan yang dihadapi.
2. Terima kasih untuk kedua orang tua penulis yang sudah memberikan dukungan dan mendoakan yang tiada hentinya untuk penulis.
3. Ibu Kinanthi Putri Ardiami, SE., M.Ak., Ak., CA. selaku Dosen Pembimbing. Terimakasih telah membimbing penulis dengan penuh kesabaran dan memberikan arahan, meluangkan waktunya, motivasi, kritik dan saran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik. Semoga ibu diberikan kesehatan dan panjang umur oleh Allah Swt.
4. Bapak Prof. Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D., CFrA, CertIPSAS selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Prof. Rifqi Muhammad, S.E., S.H., M.Sc., Ph.D., SAS, ASPM selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak Prof. Fathul Wahid, ST., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.

7. Terimakasih untuk Inndi, Della, Farida yang selalu ada memberikan dukungan semangat kepada penulis.
8. Zilva, Ismi, Selvina, Nafia dan Mbak Nyda yang memberikan semangat, saling betukar ilmu, dukungan, dan motivasi hingga penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan baik.
9. Terimakasih untuk saudara-saudaraku tersayang yang selalu menemani, memberikan hiburan dan semangat mendengarkan keluh kesah penulis saat proses mengerjakan skripsi.
10. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan selama proses penulisan tugas akhir.

Semoga Allah SWT memberikan balasan kebaikan yang tak terhingga kepada mereka atas segala kebaikan yang telah mereka lakukan kepada penulis, aamiin yarabbal'amin. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Halaman Judul.....	ii
Pernyataan Bebas Plagiarisme	Error! Bookmark not defined.
Halaman Pengesahan	iv
Berita Acara Ujian Tugas Akhir	Error! Bookmark not defined.
Motto	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi.....	ix
Daftar Tabel	xii
Daftar Gambar.....	xiii
Daftar Lampiran	xiv
Abstrak	xv
Abstract	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Sistematika Penulisan	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
2.1 Kajian Teori.....	12
2.1.1 Teori Agensi.....	12
2.1.2 Penghindaran Pajak.....	13
2.1.3 Corporate Governance.....	14
2.1.4 Komisaris Independen.....	16
2.1.5 Komite Audit.....	17
2.1.6 Kepemilikan Institusional	18
2.1.7 Kepemilikan Manajerial	19
2.1.8 Capital Intensity	19

2.2	Penelitian Terdahulu.....	21
2.3	Hipotesis Penelitian	24
2.3.1	Pengaruh komisaris independen terhadap <i>tax avoidance</i>	24
2.3.2	Pengaruh komite audit terhadap <i>tax avoidance</i>	25
2.3.3	Pengaruh kepemilikan institusional terhadap <i>tax avoidance</i>	26
2.3.4	Pengaruh kepemilikan manajerial terhadap <i>tax avoidance</i>	27
2.3.5	Pengaruh <i>capital intensity</i> terhadap <i>tax avoidance</i>	28
2.4	Kerangka Penelitian.....	29
BAB III METODE PENELITIAN.....		30
3.1	Populasi dan Sampel.....	30
3.2	Jenis dan Sumber Data	30
3.3	Definisi dan Pengukuran Variabel.....	31
3.3.1	Variabel Dependen.....	31
3.3.2	Variabel Independen	32
3.4	Metode Analisis Data	34
3.4.1	Analisis Deskriptif	34
3.4.2	Pemilihan Model Data Panel.....	34
3.4.3	Analisis Regresi Data Panel	35
3.4.4	Uji Asumsi Klasik.....	36
3.4.5	Uji Hipotesis.....	37
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.....		39
4.1	Data Penelitian	39
4.2	Analisis Data.....	40
4.2.1	Analisis Statistik Deskriptif.....	40
4.2.2	Uji Pemilihan Model.....	41
4.2.2.1	Uji Chow.....	41
4.2.2.2	Uji Lagrange Multiplier (LM Test).....	42
4.2.3	Analisis Regresi Data Panel.....	43
4.2.4	Uji Asumsi Klasik.....	45
4.2.5	Uji Hipotesis	47
4.2.6	Pembahasan.....	50
4.2.6.1	Pengaruh Komisaris Independen terhadap <i>Tax avoidance</i>	50
4.2.6.2	Pengaruh Komite Audit terhadap <i>Tax avoidance</i>	51
4.2.6.3	Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap <i>Tax avoidance</i>	53

4.2.6.4 Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap <i>Tax avoidance</i>	54
4.2.6.5 Pengaruh <i>Capital Intensity</i> terhadap <i>Tax avoidance</i>	56
BAB V PENUTUP.....	58
5.1 Kesimpulan.....	58
5.2 Keterbatasan	58
5.3 Saran.....	58
5.4 Implikasi	59
Daftar Pustaka	60
Lampiran	64

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Realisasi Penerimaan Negara Tahun 2019-2024 (dalam miliar rupiah)	1
Tabel 2. 1 Literature Review.....	22
Tabel 4. 1 Hasil Seleksi Sampel.....	39
Tabel 4. 2 Hasil Analisis Statistik Deskriptif.....	40
Tabel 4. 3 Hasil Uji Chow.....	42
Tabel 4. 4 Hasil Uji Lagrange Multiplier.....	43
Tabel 4. 5 Hasil Uji Regresi Data Panel	43
Tabel 4. 6 Hasil Uji Multikolinearitas.....	46
Tabel 4. 7 Hasil Uji Heterokedastisitas	47
Tabel 4. 8 Hasil Uji F	47
Tabel 4. 9 Hasil Uji T.....	48
Tabel 4. 10 Hasil Uji Koefisien Determinasi	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Model Kerangka Konseptual.....	29
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Perusahaan Sampel.....	64
Lampiran 2. Variabel Komisaris Independen	65
Lampiran 3. Variabel Komite Audit	69
Lampiran 4. Variabel Kepemilikan Institusional	73
Lampiran 5. Variabel Kepemilikan Manajerial	77
Lampiran 6. Variabel Capital Intensity	81
Lampiran 7. Variabel Tax Avoidance	86
Lampiran 8. Variabel Penelitian	91
Lampiran 9. Hasil Olah Data	95

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh *corporate governance* yang diwakilkan oleh variabel komisaris independen, komite audit, kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial pada penghindaran pajak. Selain itu juga ada *capital intensity* sebagai sarana pengurangan beban pajak melalui penyusutan, sehingga berpotensi mendorong praktik *tax avoidance*. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI periode tahun 2019-2024. Sampel diseleksi melalui metode *purposive sampling* maka sampel yang sesuai sebanyak 22 perusahaan, sehingga 132 data yang digunakan dalam penelitian. Metode analisis menggunakan metode analisis regresi data panel dan *software* yang digunakan untuk mengolah data adalah *Eviews 12*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komisaris independen dan komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan variabel kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Sementara itu *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Kata kunci: *tax avoidance*, komisaris independen, komite audit, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, *capital intensity*.

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of corporate governance, represented by independent commissioners, audit committees, institutional ownership, and managerial ownership, on tax avoidance. In addition, capital intensity is considered as a means of reducing tax burden through depreciation, which may potentially encourage tax avoidance practices. The data used in this study were obtained from energy sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) for the period 2019–2024. The sample was selected using purposive sampling, resulting in 22 companies and a total of 132 observations. The analytical method employed was panel data regression analysis, and the data were processed using Eviews 12 software. The results show that independent commissioners and audit committees have no significant effect on tax avoidance. Meanwhile, institutional ownership and managerial ownership have a negative effect on tax avoidance. Furthermore, capital intensity is found to have no significant effect on tax avoidance.

Keywords: tax avoidance, independent commissioners, audit committee, institutional ownership, managerial ownership, capital intensity.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Karena pajak memiliki peran penting dalam pembangunan nasional sehingga pencapaian target penerimaan yang telah ditetapkan juga menjadi hal penting. Dalam Undang-Undang No. 28 tahun 2007 mengatur tentang kontribusi wajib pajak kepada negara yang sifatnya memaksa dengan tidak ada imbalan secara langsung dan akan digunakan untuk keperluan negara dalam pembangunan nasional. Menurut Pohan (2013) pelaksanaan pembangunan bisa dilalui karena dukungan dan dana yang besar, dan dana pembangunan tersebut diperoleh dari berbagai sumber baik pemerintah dan swasta serta baik dari dalam maupun luar negeri. Salah satu sumber dana tersebut berasal dari pajak.

Tabel 1. 1 Realisasi Penerimaan Negara Tahun 2019-2024 (dalam miliar rupiah)

Sumber Penerimaan	Penerimaan Perpajakan	%	Penerimaan Bukan Pajak	%	Total	%
2019	1,546,141.90	79.08	408,994.30	20.92	1,955,136.20	100
2020	1,285,136.32	78.89	343,814.21	21.11	1,628,950.53	100
2021	1,547,841.10	77.15	458,493.00	22.85	2,006,334.10	100
2022	2,034,552.50	77.36	595,594.50	22.64	2,630,147.00	100
2023	2,118,348.00	80.42	515,800.90	19.58	2,634,148.90	100
2024	2,309,859.80	82.44	492,003.10	17.56	2,801,862.90	100

Sumber: www.bps.go.id, 2025

Mengutip dari media online pajak.com (2022) data diolah dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tahun 2020 menunjukkan bahwa penerimaan pajak selalu meningkat dari tahun ke tahun, tetapi target yang telah ditetapkan masih belum dapat dicapai. Dengan begitu, *tax ratio* Indonesia bisa dikatakan stagnan berada di angka 10-12% sejak tahun 2010 hingga 2019. Dikutip dari media online CNBC (2023) Indonesia pada tahun 2020 penerimaan perpajakan turun signifikan dampak dari pandemi dengan *tax ratio* sebesar 6,68%. Pada tahun-tahun berikutnya, *tax ratio* kembali naik sebesar 9,11% pada tahun 2021 dan 10,41% pada tahun 2022. *Tax ratio* adalah satu satu penilaian untuk melihat kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan penerimaan pajaknya. Semakin tinggi *tax ratio* yang dimiliki suatu negara maka semakin besar penerimaan pajaknya. Mengutip dari kompas.id (2023) *tax ratio* Indonesia dan Laos berada di posisi terendah di kawasan Asia Tenggara, ementara menurut data OECD tahun 2022, *tax ratio* terhadap PDB di Asia Tenggara tergolong rendah yaitu sebesar 13,6% yang mana itu dibawah rata-rata *tax ratio* di kawasan Asia Pasifik yang sebesar 17,6%. Dengan begitu menunjukan bahwa posisi Indonesia masih jauh dari kondisi ideal. Beberapa negara di Kawasan Asia Tenggara yang melampaui rata-rata Kawasan yaitu Kamboja (20,2%), Vietnam (15,8%), Thailand (15,5%), dan Filipina (15%). Menurut Jose Antonio Ramos Tan, seorang Direktur Southeast Asia for Public Management, Financial Sector and Trade di Bank Pembangunan Asia (ADB) bahwa negara-negara berkembang seperti Indonesia dan mayoritas

negara ASEAN seharusnya memiliki rasio pajak minimal 15 persen (Theodora, 2023). Mengutip dari Bisnis.com (2025), *tax ratio* Indonesia pada tahun 2024 hanya sebesar 10,08% dan ini lebih rendah dari tahun 2023 yang mencapai 10,31%. *Tax ratio* rendah ini menunjukkan adanya masalah efektivitas dalam pemungutan pajak.

Penghindaran pajak menjadi salah satu penyebab Indonesia memiliki *tax ratio* yang rendah. Temuan *tax avoidance* atau penghindaran pajak yang diestimasi merugikan negara hingga Rp 68,7 triliun per tahun temuan ini diumumkan oleh *Tax Justice Network* pada tahun 2020 melaporkan akibat dari penghindaran pajak Indonesia diperkirakan rugi hingga US\$ 4,85 miliar per tahun atau setara dengan Rp 67,6 triliun diantaranya yang berasal dari penghindaran pajak korporasi sementara sisanya sebesar 78,83 juta US Dollar atau sekitar Rp 1,1 triliun berasal dari wajib pajak orang pribadi. Sebagai akibat dari *tax avoidance* maka penerimaan pajak berkurang menyebabkan berkurangnya pendapatan negara sehingga pelaksanaan program-program pemerintah tidak maksimal (Nur'aini & Sherlita, 2023).

Menurut Pohan (2013) pajak merupakan sumber pendapatan terbesar bagi negara sehingga pemerintah menginginkan pajak yang besar. Sedangkan perusahaan sebagai wajib pajak menganggap bahwa pajak merupakan beban yang perlu diminimalisir sehingga berusaha membayar pajak serendah mungkin karena pajak akan mengurangi laba bersih. Oleh karena perbedaan kepentingan tersebut menyebabkan tindakan

penghindaran pajak oleh perusahaan untuk mengurangi beban pajak. Dari sudut pandang pemerintah, jika pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak lebih kecil dari yang seharusnya dibayarkan, maka pendapatan negara dari sektor pajak akan berkurang. Namun dari sisi perusahaan atau wajib pajak, jika pajak yang dibayar lebih besar dari jumlah yang semestinya, akan mengakibatkan kerugian (Pohan, 2013). Sementara itu salah satu tujuan dari perusahaan adalah memaksimalkan nilai perusahaan dengan memperoleh laba yang maksimal. Karena pajak merupakan salah satu faktor pengurang laba maka perusahaan berupaya meminimalkan beban pajak dalam batas yang tidak melanggar aturan perpajakan. Salah satu upaya yang bisa dilakukan yaitu melakukan *tax avoidance* (penghindaran pajak). *Tax avoidance* merupakan salah satu strategi yang digunakan untuk mengefisiensikan beban pajak secara legal. Menurut Pohan (2013) *tax avoidance* (penghindaran pajak) adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman oleh wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang mana menggunakan metode dan teknik yang memanfaatkan kelemahan- kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri agar bisa memperkecil jumlah pajak yang terutang.

Perkara penghindaran pajak yang pernah terjadi di Indonesia. Dikutip dari CNBC Indonesia (2019) PT Adaro Energy Tbk. diduga melakukan *transfer pricing* demi penghindaran pajak. Dugaan ini dilaporkan lembaga nirlaba *Global Witness*, Adaro diindikasikan melakukan penghindaran pajak

dengan memindahkan sejumlah laba yang didapatkan dari batu bara yang ditambang di Indonesia ke jaringan perusahaan luar negerinya. Diketahui sejak 2009-2017 melalui anak perusahaan Adaro yang berada di Singapura yaitu *Coaltrade Service International* melakukan *transfer pricing* sehingga Adaro bisa membayar pajak US\$ 125 juta dolar lebih rendah daripada yang seharusnya dibayarkan di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa sektor energi memiliki potensi besar terhadap praktik penghindaran pajak sehingga relevan untuk diteliti lebih lanjut.

Corporate Governance memiliki peran yang sangat penting bagi perusahaan dan menjaga suatu perusahaan tetap berjalan “*on the right track*”. Jika suatu perusahaan dapat menerapkan konsep *Corporate Governance* dan berjalan dengan baik maka akan sejalan dengan kepatuhan Perusahaan membayar pajaknya. Proksi *Corporate Governance* dalam penelitian ini adalah komisarisi independen, komite audit, kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial.

Komisaris independen merupakan salah satu komponen penting dalam *Corporate Governance*. Komisaris independen bertugas untuk memastikan penerapan *Corporate Governance* berjalan dengan baik. Komisaris independen adalah komisarisi yang bukan merupakan anggota manajemen, pemegang saham mayoritas, pejabat atau dengan cara lain yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan pemegang saham mayoritas dari suatu perusahaan yang mengawasi pengelolaan perusahaan. Karena dewan komisarisi independen cenderung untuk tidak berpengaruh

oleh tindakan manajemen, mereka cenderung mendorong manajemen perusahaan untuk mengungkapkan informasi yang lebih luas kepada para pemegang saham dan *stakeholder*. Hasil ini selaras dengan hasil penelitian bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* seperti penelitian yang dilakukan oleh Murtina et al., (2022); Purbowati, (2021); Yulianty et al., (2021). Sementara itu penelitian lain menyatakan bahwa secara parsial variabel komisaris independen memiliki pengaruh negatif terhadap *tax avoidance* (Nur'aini & Sherlita, 2023).

Selain komisaris independen, komite audit juga menjadi bagian penting dalam *corporate governance*. Komite audit bertugas sebagai pendukung dewan komisaris dalam mengawasi kinerja perusahaan. Untuk menghentikan kecurangan manajemen, komite audit mengawasi proses pembuatan laporan keuangan dan komite audit punya wewenang untuk mencegah perilaku abnormal yang berkaitan dengan pelaporan keuangan. Efektivitas pengawasan terhadap manajemen perusahaan akan meningkat seiring dengan semakin banyaknya jumlah komite audit di dalam perusahaan, dan jika pengawasan berjalan dengan efektif maka membuat manajemen takut dan cenderung tidak melakukan *tax avoidance*. Hasil ini selaras dengan hasil penelitian bahwa komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance* oleh Murtina et al., (2022); Purbowati, (2021); Yulianty et al., (2021). Namun hasil penelitian lain menyatakan bahwa secara parsial variabel komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* (Nur'aini & Sherlita, 2023).

Selanjutnya kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial, kepemilikan Institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi lain atau lembaga. Semakin besar kepemilikan saham institusional maka hak dan suaranya untuk memonitor kerja manajemen semakin besar, berarti semakin tingginya kepemilikan institusional dalam perusahaan maka membuat praktik *tax avoidance* semakin rendah (Murtina et al., 2022). Hasil ini selaras dengan hasil bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance* seperti hasil penelitian oleh Purbowati, (2021); Harianto, (2020). Namun hasil penelitian lain menyatakan bahwa kepemilikan Institusional tidak berpengaruh pada *tax avoidance* seperti hasil penelitian oleh Moeljono, (2020); Sulistiyanti & Nugraha, (2019).

Sementara itu, kepemilikan manajerial adalah saham yang dimiliki oleh pihak manajemen perusahaan yang terlibat secara aktif dalam pengambilan keputusan di suatu perusahaan (Septanta, 2023). Dalam hal ini manajer berperan ganda sebagai manajer dan pemegang saham. Semakin tinggi saham yang dimiliki oleh manajemen perusahaan mampu membuat manajemen untuk melakukan tindakan yang hati-hati sehingga tidak menimbulkan resiko pada perusahaan (Setiawan et al., 2021). Hasil penelitian yang selaras dengan kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap *tax avoidance* seperti hasil penelitian oleh Agustyo & Arianti, (2024). Namun hasil penelitian lain menyatakan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh pada *tax avoidance* seperti hasil penelitian oleh Septanta, (2023).

Selain faktor dari *corporate governance*, diketahui *capital intensity* juga menjadi faktor penting yang mempengaruhi *tax avoidance*. *Capital intensity* dapat menunjukkan seberapa besar investasi aset tetap yang dilakukan oleh suatu perusahaan. *Capital intensity* merupakan investasi perusahaan dalam bentuk aset tetap, dimana manajer akan menginvestasikan dana menganggur perusahaan ke dalam bentuk aset tetap yang kemudian akan timbul biaya depresiasi sebagai pengurang beban pajak (Sari & Indrawan, 2022). Hasil penelitian yang selaras dengan *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance* seperti yang dilakukan oleh Febriyanto et al., (2023); Darsani & Sukartha, (2021); Nabila & Kartika, (2023); Suciarti et al., (2020). Namun hasil penelitian lain menyatakan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh pada *tax avoidance* seperti yang dilakukan oleh Anggriantari & Purwantini, (2020); Agustyo & Arianti, (2024).

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut maka judul yang ditentukan dalam penelitian ini adalah “Analisis Pengaruh *Corporate Governance* dan *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Sektor Energi”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah komisisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

4. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
5. Apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh komisaris independen terhadap *tax avoidance*.
2. Untuk mengetahui pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance*.
3. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*.
4. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan manajerial terhadap *tax avoidance*.
5. Untuk mengetahui pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance*.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dapat memberikan kontribusi ilmu pengetahuan mengenai penghindaran pajak dan menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Bagi pemerintah manfaat penelitian ini yaitu sebagai informasi untuk dijadikan acuan dalam mengusulkan pembuatan regulasi pajak sehingga celah-celah regulasi yang sebelumnya dimanfaatkan tidak dapat lagi digunakan oleh perusahaan yang melakukan penghindaran pajak dan

hal ini akan berdampak pada kenaikan jumlah pendapatan di sektor pajak. Bagi perusahaan manfaat penelitian ini sebagai bahan masukan agar perusahaan lebih baik lagi dalam merencanakan pajak mereka.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan

Bab ini berisi pembahasan mengenai latar belakang penelitian, masalah penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan dan manfaat penelitian.

BAB II: Kajian Pustaka

Bab ini akan membahas pemaparan teori dan penelitian terdahulu yang digunakan sebagai landasan dalam penelitian, serta akan membahas mengenai hipotesis yang didukung dengan teori dan penelitian terdahulu.

BAB III: Metode Penelitian

Bab ini berisi informasi mengenai metode penelitian meliputi populasi dan sampel, metode pengumpulan data, variabel penelitian, dan metode analisis data.

BAB IV: Analisis Data dan Pembahasan

Bab ini berisi hasil dari pengolahan data yang dilakukan peneliti sesuai dengan metode analisis yang dijabarkan di bab sebelumnya, dan hasil dari uji hipotesis penelitian diuraikan dalam bab ini.

BAB V: Penutup

Bab ini adalah bagian terakhir yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi ringkasan hasil penelitian, implikasi penelitian dan

batasan penelitian. Saran berisi usulan atau rekomendasi yang mungkin bisa dilakukan pada penelitian selanjutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teori

2.1.1 Teori Agensi

Teori agensi atau teori keagenan menurut Jensen & Meckling, (1976) merupakan hubungan antara manajer sebagai agen dan pemilik sebagai prinsipal yang mana pemberian wewenang dilakukan oleh pemilik kepada manajer untuk mengoperasikan perusahaan dan membuat keputusan mewakili prinsipal. Teori keagenan dijelaskan memisahkan fungsi kepemilikan dan pengelolaan (Yulianty et al., 2021). Teori ini berfokus pada setiap organisasi individu yang disebut sebagai agen dan memperlakukan mereka sebagai entitas yang dapat dipercaya oleh organisasi individu lainnya yang disebut sebagai prinsipal. Hubungan keduanya terjadi di dalam organisasi perusahaan yang mana pengelola sebagai agen dan pemegang saham sebagai prinsipal. Dengan begitu para ahli memiliki asumsi bahwa dua pihak tersebut memiliki kepentingan yang berbeda. Kepentingan yang berbeda tersebut mendorong sebuah sistem yang dapat memonitor para agen oleh principal. Karena manajer biasanya memiliki keterampilan yang lebih baik daripada pemilik, mekanisme kontrol tersebut sulit dilakukan dan menghasilkan biaya. Selain itu, mekanisme kontrol ini tidak mungkin diamati secara langsung dan terus-menerus. Oleh karena itu para ahli juga berpendapat, meskipun sifatnya kompleks struktur organisasi menjadi upaya yang masuk akal. Struktur organisasi dapat menciptakan sistem yang

secara efektif mengatur hubungan kerja sama antara individu. Hubungan keagenan ini juga membuat para ahli percaya bahwa struktur organisasi dan mekanisme kontrol berbeda antar organisasi maupun antar penugasan satu dengan lainnya. Ketidaksimetrisan informasi yang terjadi antara prinsipal dan agen, menentukan tingkat perbedaan dari atribut struktur dan mekanisme yang digunakan oleh suatu organisasi (Lukviarman, 2016).

2.1.2 Penghindaran Pajak

Menurut Pohan (2013) penghindaran pajak atau sering juga disebut *tax avoidance* adalah upaya wajib pajak untuk memperkecil jumlah pajak terutang secara legal dan aman dengan cara memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan. Jika *tax avoidance* mengeksploitasi celah-celah yang terdapat dalam undang-undang perpajakan yang membuat petugas pajak tidak bisa berbuat apa-apa. *Tax evasion* merupakan kebalikan dari *tax avoidance* strateginya dilakukan secara ilegal dengan metode dan teknik yang tidak berada dalam koridor peraturan perpajakan cara ini beresiko dan berpotensi dikenakan sanksi pelanggaran hukum atau tindak pidana fiskal (Pohan, 2013). Namun dalam praktiknya kedua metode tersebut memiliki perbedaan yang sangat tipis, karena pada hakikatnya *tax avoidance* tetap dianggap sebagai perbuatan yang sifatnya mengurangi utang pajak secara ilegal bukan mengurangi kesanggupan atau kewajiban wajib pajak melunasi pajaknya. Oleh karena itu yang pada awalnya *tax avoidance* bisa saja terjebak menjadi *tax evasion*. Dalam melakukan *tax avoidance* perusahaan harus berhati-hati

agar tidak terperangkap ke dalam praktik *tax evasion*, apabila terperangkap maka berpotensi merugikan perusahaan karena melanggar aturan perpajakan (Pohan, 2013).

2.1.3 Corporate Governance

Cadbury (2002) memberikan definisi bahwa *Corporate Governance* berfokus pada menjaga keseimbangan antara tujuan ekonomi dan sosial serta antara tujuan individu dan tujuan bersama, maka kerangka tata kelola dibuat agar penggunaan sumber daya efisien dan dapat dipertanggungjawabkan, serta untuk menyelaraskan kepentingan individu, korporasi, dan masyarakat. Definisi ini menunjukkan signifikansi peran yang dimiliki oleh *Corporate Governance* kepada masyarakat agar stabil dan sejahtera.

Menurut FCGI, *Corporate Governance* didefinisikan sebagai seperangkat aturan untuk menghubungkan antara pemangku kepentingan, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta pihak internal dan eksternal lainnya. *Corporate Governance* merupakan sebuah sistem yang dijalankan oleh pihak yang berkepentingan terdiri dari fungsi-fungsi untuk meningkatkan nilai perusahaan sebagai entitas ekonomi maupun entitas sosial sesuai dengan prinsip-prinsip dasar yang berterima umum (Warsono et al., 2009). Prinsip-prinsip dasar *Corporate Governance* berterima umum adalah *transparency, accountability and responsibility, responsiveness, independency, dan fairness*. Berikut ini adalah berbagai fungsi dan para pihak yang berkaitan dengan penerapan *Corporate Governance*:

1. *Oversight* (perhatian secara bertanggung jawab) oleh *Board of Directors* (Dewan Direksi).
2. *Enforcement* (penegakan) oleh *Chief Executive Officers* (Pejabat Eksekutif).
3. *Advisory* (pemberian saran) oleh *Boards of Commissions/ Committees* (Dewan Komisaris/ Komite).
4. *Assurance* (penjaminan) oleh *Auditors* (Pemeriksa).
5. *Monitoring* (pemantauan) oleh *Stakeholders* (Pemangku kepentingan).

Berdasarkan prinsip dasar *Corporate Governance* berterima umum maka para pihak tersebut berperan menjalankan fungsinya masing-masing. Keberadaan *Corporate Governance* berperan besar pada kemajuan ekonomi dan kesejahteraan sosial, seperti tersedia insentif dan indikator penilaian kinerja dalam mencapai keberhasilan perusahaan. Karena *Corporate Governance* dianggap memiliki makna yang luas sebagai dampak dari perkembangan perusahaan yang semakin kompleks maka banyak pihak menuntut perusahaan memperhatikan aspek-aspek yang lebih luas. Oleh karena itu diharapkan perusahaan bukan hanya berperan sebagai entitas bisnis yang bertujuan hanya untuk memakmurkan pemilik tetapi juga sebagai entitas yang meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat dan lingkungan sekitar.

2.1.4 Komisaris Independen

Dalam keputusan Ketua Bapepam dan LK nomor Kep-643/BL/2012, komisaris independen adalah anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar Emiten atau Perusahaan Publik. Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.
2. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.
3. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.
4. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.

Jadi komisaris independen adalah komisaris yang bukan merupakan anggota manajemen, pemegang saham mayoritas, pejabat atau dengan cara lain yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan pemegang saham mayoritas dari suatu perusahaan yang mengawasi

pengelolaan perusahaan. Komisaris independen berfungsi untuk mengawasi.

2.1.5 Komite Audit

Dalam keputusan Ketua Bapepam dan LK nomor Kep-643/BL/2012, komite audit adalah komite yang dibentuk untuk membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris. Anggota komite audit diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris. Perusahaan Publik wajib memiliki komite audit. Komite audit berperan sebagai pihak independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain seperti melakukan pemeriksaan atas informasi keuangan dan atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan, memberikan pendapat independen dan rekomendasi, melakukan pemeriksaan pelaksanaan auditor internal dan temuannya, serta memeriksa pengaduan tentang proses akuntansi. Dalam melaksanakan tugasnya komite audit mempunyai wewenang untuk mengakses informasi yang diperlukan, berkomunikasi langsung dengan karyawan, jika diperlukan untuk membantu tugasnya komite audit bisa melibatkan pihak independen dari luar anggota komite audit, dan melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh dewan komisaris. Jadi komite audit berperan sebagai pendukung dewan komisaris dalam mengawasi kinerja perusahaan. Komite audit dibentuk untuk mengawasi proses pembuatan laporan keuangan dan komite audit punya wewenang untuk mencegah perilaku abnormal yang berkaitan dengan pelaporan keuangan.

2.1.6 Kepemilikan Institusional

Brealey, Myers, dan Marcus (2008) percaya bahwa kepemilikan institusional berarti bahwa sebagian saham dipegang langsung oleh investor individu, tetapi sebagian besar oleh institusi keuangan seperti reksa dana, dana pensiun dan perusahaan asuransi. Tarjo (2008) menjelaskan bahwa kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan oleh perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, dan institusi atau lembaga lain, serta kepemilikan institusi lain. Kepemilikan Institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi lain atau lembaga.

Kepemilikan institusional dalam perusahaan berfungsi untuk menjadi pihak yang melakukan monitor dan pengawasan terhadap kinerja manajemen. Maka dengan adanya kepemilikan institusional dalam perusahaan pihak manajemen akan lebih berhati-hati dalam melaksanakan kewajibannya. Oleh karena itu kepemilikan institusional diduga sebagai salah satu faktor praktek penghindaran pajak, hal ini dikarenakan mampu mengintervensi kebijakan manajemen. Namun, kepemilikan institusional juga mampu menjadi pengawas internal jalannya roda perusahaan dari praktik penghindaran pajak, dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dan benar. Semakin besar kepemilikan saham institusional maka hak dan suaranya untuk memonitor kerja manajemen semakin besar, berarti semakin tingginya kepemilikan institusional dalam perusahaan maka membuat praktik *tax avoidance* semakin rendah (Murtina et al., 2022).

2.1.7 Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial adalah suatu kondisi di mana manajer mengambil bagian dalam struktur modal perusahaan atau dengan kata lain manajer tersebut berperan ganda sebagai manajer sekaligus pemegang saham di perusahaan (Septanta, 2023). Struktur pada kepemilikan saham manajerial diukur sebagai presentasi saham biasa dan opsi saham yang dimiliki oleh pihak manajemen yaitu direktur dan karyawan (Rasmita, 2020). Jika saham yang dimiliki oleh manajemen tinggi maka tindakan yang dilakukan manajemen menjadi lebih berhati-hati sehingga tidak menimbulkan resiko di dalam perusahaan (Setiawan et al., 2021). Semakin tinggi persentase kepemilikan saham manajerial pada perusahaan, maka manajemen cenderung lebih memihak kepentingan pemegang saham karena apabila terjadi keputusan yang salah, manajemen juga akan menanggung konsekuensinya (Rasmita, 2020). Dengan begitu kepemilikan saham oleh manajer membuat manajer cenderung mempertimbangkan kelangsungan perusahaan sehingga manajer tidak akan menghendaki perusahaannya diperiksa terkait permasalahan perpajakan.

2.1.8 Capital Intensity

Capital Intensity adalah aktivitas investasi yang terbentuk aset tetap yang dilakukan oleh perusahaan. Perusahaan yang memiliki aset tetap akan mengalami beban penyusutan yang akan meminimalisirkan laba sebelum pajak. Aset tetap perusahaan memiliki beragam manfaat sehingga aktiva yang sudah diperkecil diakui sebagai biaya penyusutan dalam laporan

finansial perusahaan. Oleh karena itu beban penyusutan yang dialami apabila semakin bertambah maka semakin berkurang tarif pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan. *Capital intensity* yaitu usaha perusahaan terhadap wujud aset tetap, karena manajer akan segera menyimpan dana perusahaan yang tidak digunakan dalam bentuk aset tetap yang kemudian akan menghasilkan biaya penyusutan sebagai faktor dalam meminimalkan beban pajak (Bella & Machdar, 2025).

Capital Intensity yaitu tindakan investasi yang dilakukan suatu perusahaan yang berkaitan dengan penanaman modal terhadap harta tetap dan persediaan. Persamaan ini mencerminkan seberapa besar aset perusahaan yang diinvestasikan dalam bentuk aset tetap. Aset tetap merupakan salah satu wujud kekayaan yang berpengaruh pada kinerja keuangan perusahaan dengan potensi meminimalkan pendapatan perusahaan, karena itu nilai aktiva tetap akan menyusut dan menjadi beban untuk perusahaan, hal ini menandakan apabila aset tetap bisa dipergunakan perusahaan untuk melakukan pengurangan kewajiban pajak perusahaan (Bella & Machdar, 2025). Oleh karena itu untuk mengurangi keuntungan perusahaan, perusahaan dapat menggunakan beban depresiasi aset tetap untuk mengurangi keuntungan mereka yang menjadikan dasar perhitungan pajak perusahaan. Aset tetap memiliki masa manfaat ekonomis yang berarti ada pengeluaran depresiasi setiap tahun. Jumlah modal yang diperlukan sebagai upaya menghasilkan pendapatan dikenal sebagai intensitas modal. Aset tetap dapat meminimalkan pembayaran pajak yang harus dibayarkan

oleh perusahaan terdapat biaya depresiasi yang berkaitan dengan aset tetap tersebut.

2.2 Penelitian Terdahulu

Undang-Undang No 28 tahun 2007 mengatur tentang kontribusi wajib pajak kepada negara yang sifatnya memaksa dengan tidak ada imbalan secara langsung dan akan digunakan untuk keperluan negara dalam pembangunan nasional. Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar bagi negara sehingga pemerintah menginginkan pajak yang besar. Sedangkan perusahaan sebagai wajib pajak menganggap bahwa pajak merupakan beban yang perlu diminimalisir sehingga berusaha membayar pajak serendah mungkin karena pajak akan mengurangi laba bersih. Oleh karena perbedaan kepentingan tersebut menyebabkan tindakan penghindaran pajak oleh perusahaan untuk mengurangi beban pajak. Pohan (2013) menjelaskan dari sudut pandang pemerintah, jika pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak lebih kecil dari yang seharusnya dibayarkan, maka pendapatan negara dari sektor pajak akan berkurang. Namun dari sisi perusahaan atau wajib pajak, jika pajak yang dibayar lebih besar dari jumlah yang semestinya, akan mengakibatkan kerugian. Sementara itu salah satu tujuan dari perusahaan adalah memaksimalkan nilai perusahaan dengan memperoleh laba yang maksimal. Karena pajak merupakan salah satu faktor pengurang laba maka perusahaan berupaya meminimalkan beban pajak dalam batas yang tidak melanggar aturan perpajakan. Salah satu upaya yang bisa dilakukan yaitu melakukan *tax avoidance* (penghindaran pajak). *Tax avoidance* merupakan

salah satu strategi yang digunakan untuk mengefisiensikan beban pajak secara legal. *Tax avoidance* (penghindaran pajak) adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman oleh wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang mana menggunakan metode dan teknik yang memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri agar bisa memperkecil jumlah pajak yang terutang (Pohan, 2013).

Tabel 2. 1 Literature Review

No.	Variabel Bebas	Hasil Penelitian dan Peneliti
1.	Kepemilikan Manajerial	- Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. (Murtina et al., 2022); (Septanta, 2023). - Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. (Sulistiyanti & Nugraha, 2019) - Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i>. (Agustyo & Arianti, 2024); (Nurmawan & Nuritomo, 2022); (Rahmad et al., 2025). - Kepemilikan manajerial memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>. (Setiawan et al., 2021).
2.	Kepemilikan Institusional	- Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak. (Harianto, 2020) - Kepemilikan institusional tidak berpengaruh pada penghindaran pajak. (Moeljono, 2020); (Sulistiyanti & Nugraha, 2019)

		- Kepemilikan institusional secara parsial variabel memiliki pengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i>. (Nur'aini & Sherlita, 2023); (Nabila & Kartika, 2023); (Oktaviana & Kholis, 2021); (Murtina et al., 2022); (Purbowati, 2021). - Kepemilikan institusional berpengaruh positif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>. (Ubaidillah, 2021)
3.	Komisaris Independen	- Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. (Murtina et al., 2022); (Purbowati, 2021); (Yulianty et al., 2021); (Ubaidillah, 2021) - Komisaris independen secara parsial memiliki pengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i>. (Nur'aini & Sherlita, 2023); (Sahara, 2022) - Komisaris independen secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap <i>tax avoidance</i>. (Oktaviana & Kholis, 2021)
4.	Komite Audit	- Komite Audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. (Murtina et al., 2022); (Sahara, 2022); (Ubaidillah, 2021); (Oktaviana & Kholis, 2021). - bahwa secara parsial variabel Komite Audit tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>. (Jusman & Nosita, 2020); (Purbowati, 2021); (Yulianty et al., 2021); (Nur'aini & Sherlita, 2023).
5.	<i>Capital Intensity</i>	- <i>Capital intensity</i> tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. (Anggriantari & Purwantini, 2020) - <i>Capital intensity</i> berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. (Nabila & Kartika, 2023); (Suciarti et al., 2020)

		- <i>Capital intensity</i> berpengaruh terhadap penghindaran pajak. (Sari & Indrawan, 2022) - <i>Capital intensity</i> tidak berdampak signifikan terhadap penghindaran pajak. (Efendi & Winingrum, 2025) - <i>Capital intensity</i> memiliki pengaruh yang signifikan dan mengalami korelasi positif dengan <i>tax avoidance</i>. (Febriyanto et al., 2023); (Darsani & Sukartha, 2021); (Hardana & Hasibuan, 2023); (Widyastuti et al., 2022). - <i>Capital intensity</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>. (Agustyo & Arianti, 2024)
--	--	---

2.3 Hipotesis Penelitian

2.3.1 Pengaruh komisaris independen terhadap *tax avoidance*

Komisaris independen adalah komisaris yang bukan bagian dari anggota manajemen, pemegang saham mayoritas, atau pejabat lainnya yang berhubungan langsung ataupun tidak langsung dengan pemegang saham mayoritas dari suatu perusahaan. Salah satu bagian dari *corporate governance* adalah dewan komisaris independen. Dalam teori agensi, komisaris independen berperan sebagai mekanisme pengawasan untuk mengurangi konflik kepentingan antara pemegang saham dan manajemen, serta memastikan prinsip *corporate governance* diterapkan dalam suatu perusahaan. Dewan komisaris independen bertanggungjawab memastikan bahwa prinsip dan praktik *corporate governance* diterapkan dalam semua kegiatan operasional perusahaan. Keberadaan dewan komisaris independen membantu perusahaan mengawasi tindakan manajemen. Adanya

pengawasan ini mendorong perilaku manajemen agar lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan termasuk keputusan perpajakan dan pengungkapan laporan keuangan menjadi lebih transparan. Dewan komisaris independen cenderung mendorong manajemen perusahaan untuk mengungkapkan informasi yang lebih luas kepada para pemegang saham dan stakeholder karena tidak dapat dipengaruhi oleh tindakan manajemen. Hasil ini selaras dengan temuan hasil penelitian sebelumnya. Dalam penelitian sebelumnya menyatakan bahwa variabel komisaris independen secara parsial berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* seperti hasil penelitian oleh Nur'aini & Sherlita, (2023); Nabila & Kartika, (2023). Dengan begitu hipotesis pertama pada penelitian ini adalah:

H1: Komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*

2.3.2 Pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance*

Komite audit dibentuk sesuai dengan keputusan Ketua Bapepam dan LK nomor Kep-643/BL/201 yaitu komite yang untuk membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris. Komite audit berperan sebagai pendukung dewan komisaris dalam mengawasi kinerja perusahaan. Dalam perspektif teori agensi, keberadaan komite audit merupakan salah satu bagian dari corporate governance perusahaan yang dapat mengurangi konflik kepentingan antara pemegang saham dan manajemen. Ini disebabkan karena manajemen memiliki informasi lebih banyak (asimetri informasi) dan berpotensi bertindak untuk kepentingan pribadi, termasuk

melakukan praktik penghindaran pajak yang dapat merugikan pemegang saham dalam jangka panjang. Oleh karena itu komite audit mengawasi proses pembuatan laporan keuangan untuk mencegah kecurangan manajemen. Komite audit juga memiliki wewenang untuk mencegah perilaku tidak biasa yang berkaitan dengan pelaporan keuangan. Semakin banyak jumlah komite audit di dalam perusahaan maka semakin efektif pengawasannya terhadap manajemen perusahaan. Jika pengawasan berjalan dengan baik, manajemen cenderung menghindari pelanggaran pajak. Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan selaras dengan pernyataan tersebut bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* seperti hasil penelitian oleh Murtina et al., (2022); Sahara, (2022); Ubaidillah, (2021); Oktaviana & Kholis, (2021). Dengan begitu hipotesis kedua pada penelitian ini adalah:

H2: Komite Audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*

2.3.3 Pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*

Lembaga atau institusi lain memiliki saham perusahaan dalam bentuk kepemilikan institusional. Kepemilikan Institusional adalah sebuah kepemilikan perusahaan yang mana didalamnya dikuasai oleh institusi, perusahaan atau lembaga lain seperti asuransi, investasi, perbankan bahkan oleh negara. Adanya kepemilikan oleh investor institusional seperti perusahaan efek, perusahaan asuransi, perbankan, perusahaan investasi, dana pensiun, dan kepemilikan institusi lain akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal (Sulistiyanti & Nugraha, 2019). Teori

agensi dapat mendukung variabel ini, kepemilikan institusional berperan sebagai mekanisme pengawasan yang mengurangi konflik kepentingan akibat asimetri informasi. Kepemilikan yang besar memberi hak suara lebih untuk mengawasi manajemen, jadi semakin besar maka hak dan suaranya untuk memonitor kerja manajemen semakin besar, yang artinya semakin tingginya kepemilikan institusional dalam perusahaan maka membuat praktik *tax avoidance* semakin rendah (Murtina et al., 2022). Hasil ini sejalan dengan temuan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* seperti hasil penelitian oleh Purbowati, (2021); Oktaviana & Kholis, (2021); Murtina et al., (2022); Nur'aini & Sherlita, (2023); Nabila & Kartika, (2023). Dengan begitu hipotesis ketiga pada penelitian ini adalah:

H3: Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*

2.3.4 Pengaruh kepemilikan manajerial terhadap *tax avoidance*

Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak manajemen dalam perusahaan (Agustyo & Arianti, 2024). Kepemilikan Manajerial adalah para pemegang saham di perusahaan mempunyai kedudukan dalam manajemen perusahaan baik sebagai dewan direktur, dewan dewan komisaris, dan dewan direksi (Sulistiyanti & Nugraha, 2019). Jika saham yang dimiliki oleh manajemen tinggi maka perusahaan mampu membuat manajemen untuk melakukan tindakan yang hati-hati sehingga tidak menimbulkan resiko pada perusahaan. Ini berkaitan

dengan teori agensi yang mana kepemilikan manajerial dapat mengurangi konflik kepentingan antara manajemen sebagai agen dan pemegang saham (principal) karena manajemen menjadi bagian dari pemilik perusahaan (Septanta, 2023). Ini berarti tujuan manajemen dengan tujuan pemegang saham akan selaras sehingga manajemen akan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan, termasuk dalam perpajakan. Hasil ini sejalan dengan temuan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* seperti penelitian oleh Agustyo & Arianti, (2024); Nurmawan & Nuritomo, (2022); Rahmad et al., (2025). Dengan begitu hipotesis keempat pada penelitian ini adalah:

H4: Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*

2.3.5 Pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance*

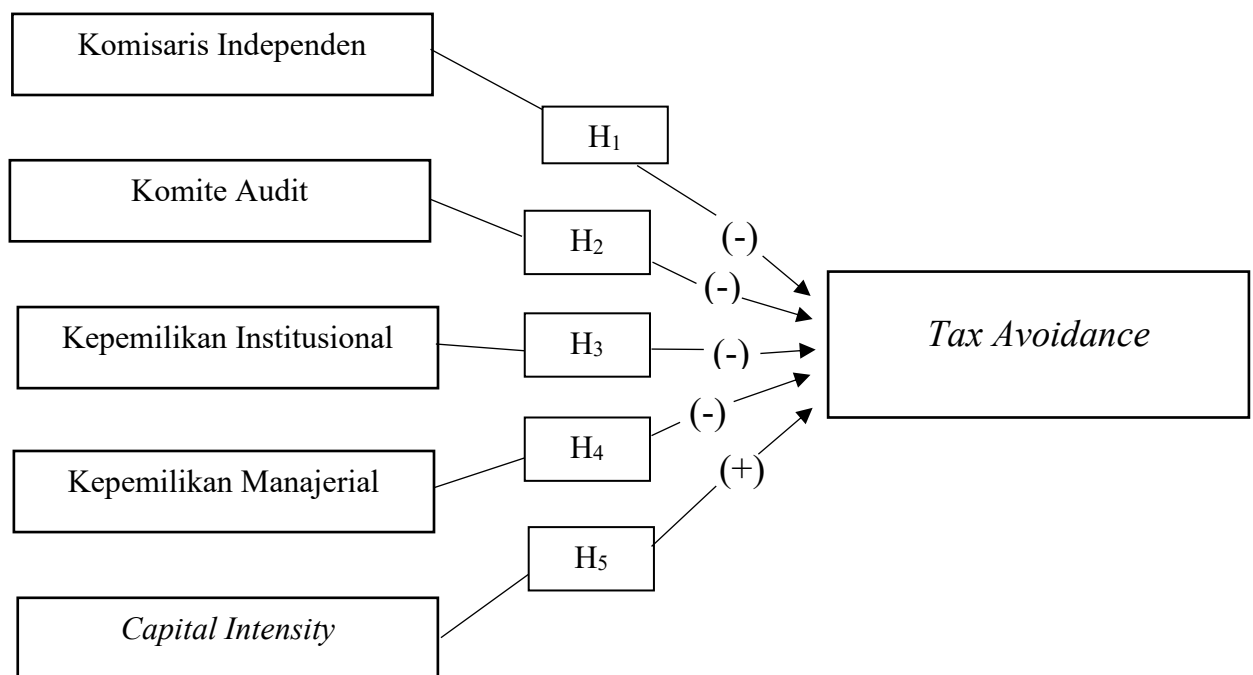
Capital intensity merupakan investasi perusahaan yang difokuskan pada aset tetap (Sari & Indrawan, 2022). Dalam teori agensi dijelaskan terjadi perbedaan kepentingan antara manajemen dan pemegang saham perusahaan. Untuk mengurangi beban pajak, manajer akan menginvestasikan dana menganggur perusahaan ke dalam aset tetap (Sari & Indrawan, 2022). Keterkaitan *capital intensity* dengan penghindaran pajak disebabkan oleh besarnya biaya penyusutan perusahaan yang dapat mengurangi laba sehingga meningkatnya tindakan *tax avoidance*. Semakin tinggi *capital intensity* maka semakin tinggi tindakan *tax avoidance* karena aset tetap mengalami penyusutan dimana biaya penyusutan ini dapat

mengurangi beban pajak perusahaan. Ini sejalan dengan temuan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* seperti hasil penelitian oleh Hardana & Hasibuan, (2023); Widyastuti et al., (2022); Febriyanto et al., (2023); Darsani & Sukartha, (2021). Dengan begitu hipotesis kelima pada penelitian ini adalah:

H5: *Capital Intensity* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*

2.4 Kerangka Penelitian

Berdasarkan landasan teori, penelitian terdahulu, dan hipotesis penelitian yang sebelumnya sudah dijelaskan maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis bagaimana pengaruh komisaris independen, komite audit, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan *capital intensity* terhadap *tax avoidance*.



Gambar 2. 1 Model Kerangka Konseptual

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel

Dalam penelitian ini populasi yang digunakan adalah perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2019-2024.

Sugiyono (2013) menyatakan bahwa sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sampel dalam penelitian ini sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan menggunakan metode *purposive sampling*. Beberapa kriteria yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI periode tahun 2019-2024.
2. Perusahaan sektor energi yang memperoleh laba selama periode tahun 2019-2024.
3. Perusahaan sektor energi yang memiliki kelengkapan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data kuantitatif dan data sekunder dari laporan keuangan tahunan perusahaan yang terdaftar pada database osiris dan BEI pada periode tahun 2019-2024. Data diperoleh melalui data base

osiris dan website BEI yaitu www.idx.com, dengan metode dokumentasi yang digunakan untuk mengumpulkan data ini.

3.3 Definisi dan Pengukuran Variabel

3.3.1 Variabel Dependen

Variabel dependen atau variabel terikat adalah variabel yang menjadi akibat atau yang dipengaruhi karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2013). Pada penelitian ini yang menjadi variabel dependen adalah penghindaran pajak. Penghindaran pajak atau biasa disebut juga dengan *tax avoidance* adalah upaya wajib pajak untuk memperkecil jumlah pajak terutang secara legal dan aman dengan cara memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan (Moeljono, 2020). Pada penelitian ini model pengukuran *tax avoidance* adalah *Effective Tax Rate* (ETR). Penghitungan ETR dilakukan dengan membagi total beban pajak perusahaan dengan laba sebelum pajak penghasilan (Sulistiyanti & Nugraha, 2019). ETR berbanding terbalik dengan *tax avoidance* artinya semakin besar nilai ETR yang dihasilkan maka semakin kecil tingkat *tax avoidance* suatu perusahaan dan sebaliknya semakin kecil nilai ETR maka semakin besar tingkat *tax avoidance* suatu perusahaan (Tanjaya & Nazir, 2021).

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

3.3.2 Variabel Independen

Variabel Independen atau variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Variabel Indepen dalam penelitian ini:

1. Komisaris Independen

Komisaris independen berperan untuk menjaga keseimbangan dewan komisaris pada suatu perusahaan supaya tetap independen dalam melaksanakan pengawasan. Variabel komisaris independen diukur menggunakan pembagian jumlah dewan komisaris independen dengan anggota dewan komisaris (Nur'aini & Sherlita, 2023).

$$\text{Komisaris Independen} = \frac{\sum \text{Anggota Komisaris Independen}}{\sum \text{Seluruh Anggota Komisaris}}$$

2. Komite Audit

Komite audit dibentuk untuk mengawasi proses pembuatan laporan keuangan dan komite audit punya wewenang untuk mencegah perilaku abnormal yang berkaitan dengan pelaporan keuangan. Variabel komite audit diukur dengan cara membagi jumlah komite audit di luar komisaris independen dengan jumlah komite audit dalam perusahaan (Nur'aini & Sherlita, 2023).

$$\text{Komite Audit} = \sum \text{Komite Audit}$$

3. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi lain atau lembaga (Purbowati, 2021). Variabel kepemilikan institusional diukur dengan membandingkan saham yang dimiliki institusi dan jumlah saham keseluruhan yang dimiliki oleh perusahaan (Nur'aini & Sherlita, 2023). Kepemilikan institusional menggunakan unit pengukuran dalam satuan persentase.

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\sum \text{Saham Institusi}}{\sum \text{Saham Keseluruhan}}$$

4. Kepemilikan manajerial.

Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak manajemen dalam perusahaan (Agustyo & Arianti, 2024). Variabel kepemilikan manajerial diukur dengan prosentase saham yang dimiliki oleh manajer dibagi dengan total saham yang beredar (Purbowati, 2021).

$$\text{Kepemilikan manajerial} = \frac{\sum \text{Saham Manajer}}{\sum \text{Saham Keseluruhan}}$$

5. *Capital Intensity*

Capital intensity merupakan investasi perusahaan yang difokuskan pada aset tetap (Sari & Indrawan, 2022). Variabel *capital intensity* dihitung dengan proksi total aset tetap dibagi dengan total aset yang dimiliki perusahaan (Efendi & Winingrum, 2025). Berikut rumus *capital intensity*:

$$\text{Capital Intensity} = \frac{\text{Total Aset Tetap}}{\text{Total Aset}}$$

3. 4 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan analisis regresi data panel. *Software Eviews 12* digunakan sebagai alat bantu olah data. Penelitian ini akan menggunakan tiga prosedur pemilihan model yaitu CEM (*Common Effect Model*), FEM (*Fix Effect Model*), dan REM (*Random Effect Model*).

3.4.1 Analisis Deskriptif

Statistik deskripsi adalah statistik untuk analisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya dan tidak membuat kesimpulan yang general. Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis, dan skewness (kemencengan distribusi). Tujuan statistik deskriptif adalah untuk memberikan gambaran data penelitian.

3.4.2 Pemilihan Model Data Panel

3.4.2.1 Uji Chow

Uji chow digunakan untuk memilih model data panel yaitu antara *common effect model* dan *fix effect model*. Penentuan model ini berdasarkan nilai probabilitas *cross section* F dari hasil uji ini. Apabila nilai probabilitas $> 0,05$ maka model yang terpilih CEM, namun jika nilai probabilitas $\leq 0,05$ maka model yang dipilih Adalah FEM.

3.4.2.2 Uji Hausman

Uji hausman merupakan uji yang digunakan untuk menentukan *fixed effect* atau *random effect model*. Setelah melakukan uji chow maka uji hausman dilakukan. Dalam uji ini *cross section random* menjadi dasar keputusan. Jika probabilitas *cross section random* $> 0,05$ maka model yang dipilih REM, namun jika probabilitas *cross section random* $\leq 0,05$ maka model yang dipilih FEM.

3.4.2.3 Uji Langrange Multiplier

Uji LM Test digunakan untuk mengetahui apakah *random effect model* lebih baik daripada *common effect model*. Uji ini dilakukan ketika model yang terpilih yaitu *common effect model*. Jika probabilitas breusch-pagan $> 0,05$ maka model yang terpilih yaitu CEM, dan jika nilai probabilitas $\leq 0,05$ maka REM Adalah model yang terpilih.

3.4.3 Analisis Regresi Data Panel

Data panel Adalah data gabungan dari data *cross-section* dan *time series*. Kumpulan data yang disusun berdasarkan waktu seperti tahunan dapat membentuk data time series. Di sisi lain, kumpulan data yang diperoleh dari berbagai sampel pada satu titik waktu disebut dengan data cross-section. Kombinasi kedua jenis data ini menghasilkan data panel yang mencakup pengamatan dalam periode waktu tertentu. Model regresi data panel adalah:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \dots + \beta_n X_n + e$$

3.4.4 Uji Asumsi Klasik

3.4.2.1 Uji Normalitas

Tujuan uji normalitas adalah untuk mengkaji apakah variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal dalam suatu model regresi (Ghozali, 2018). Dalam uji t dan F diasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil jika asumsi tersebut dilanggar. Terdapat dua cara untuk mendeteksi residual terdistribusi normal atau tidak yaitu dengan cara analisis grafik dan uji statistik.

3.4.2.2 Uji Multikolinieritas

Tujuan uji multikolinieritas adalah untuk menemukan adanya korelasi antar variabel independen dalam model regresi, karena seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel independen agar menjadi model regresi yang baik (Ghozali, 2018). Apabila variabel independen saling berkorelasi maka variabel-variabel itu tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar variabel independen sama dengan nol (Ghozali, 2018). Multikolinearitas dapat dilihat dari nilai tolerance dan variance inflation factor (VIF). Nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi ($VIF = 1/Tolerance$).

3.4.2.3 Uji Heterokedastisitas

Tujuan uji heteroskedastisitas adalah untuk menguji apakah terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke

pengamatan yang lain dalam model regresi (Ghozali, 2018). Model regresi dikatakan baik jika tidak terjadi heteroskedastisitas atau yang Homoskedastisitas. Homoskedastisitas terjadi jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, sedangkan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Data *cross section* kebanyakan mengandung situasi heteroskedastisitas itu karena data tersebut mewakili berbagai ukuran (kecil, sedang, besar). Salah satu cara mendeteksi heteroskedastisitas adalah dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel dependen yaitu ZPRED dengan residual SRESID.

3.4.2.4 Uji Autokorelasi

Tujuan uji autokorelasi adalah untuk menguji adakah korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya) dalam model regresi (Ghozali, 2018). Jika terjadi korelasi maka disebut terdapat problem autokorelasi. Regresi yang bebas dari autokorelasi adalah model regresi yang baik. Uji Durbin - Watson (DW test) dapat digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi.

3.4.5 Uji Hipotesis

Setelah syarat melakukan uji asumsi klasik diselesaikan maka selanjutnya uji hipotesis dilakukan. Tujuan uji hipotesis adalah untuk mengukur koefisien determinasi, nilai uji F, dan nilai uji t. Selain itu juga untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh dan untuk mengetahui proporsi pengaruh dari variabel dependen terhadap variabel independen.

3.4.3.1 Uji F

Tujuan uji f adalah untuk membuktikan semua variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Pengambilan keputusan didasarkan pada angka probabilitas signifikansi dengan ketentuan jika probabilitas signifikansi $> 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Dan sebaliknya jika nilai probabilitas signifikansi $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

3.4.3.2 Uji t

Tujuan uji t adalah untuk membuktikan secara individu apakah variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Setiap peneliti mengajukan dua hipotesis yaitu hipotesis nol (H_0) dan hipotesis alternatif (H_a). Penerimaan dan penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria pengujian yaitu jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka hipotesis H_0 ditolak dan H_a diterima, itu artinya variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Sedangkan jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka hipotesis H_0 diterima dan H_a ditolak, berarti tidak ada pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen secara parsial.

3.4.3.3 Koefisien Determinasi

Tujuan uji koefisien determinasi (R^2) adalah untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Jika nilai koefisien determinasi kecil artinya kemampuan variabel independen dalam menjalankan variabel dependen sangat terbatas.

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Data Penelitian

Data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data tersebut diperoleh dari Osiris database dan Bursa Efek Indonesia. Sebanyak 87 perusahaan energi yang terdaftar di BEI pada tahun 2019-2024. Metode *purposive sampling* digunakan dalam pemilihan sampel pada penelitian ini. Didapatkan sebanyak 22 perusahaan energi yang akan digunakan sebagai sampel penelitian ini.

Tabel 4. 1 Hasil Seleksi Sampel

No.	Kriteria	Jumlah
1.	Perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI periode tahun 2019-2024	87
2.	Perusahaan sektor energi yang tidak memperoleh laba selama periode tahun 2019-2024	(64)
3.	Perusahaan sektor energi yang tidak memiliki kelengkapan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian	(1)
	Jumlah sampel perusahaan	22
	Jumlah tahun	6
	Jumlah data sampel	132

Sumber: Data diolah, 2025

4.2 Analisis Data

4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif digunakan mendeskripsikan data dari data nilai minimum, nilai maksimum, nilai mean, dan nilai standar deviasi. Tabel di bawah ini merupakan hasil dari uji analisis statistik deskriptif.

Tabel 4. 2 Hasil Analisis Statistik Deskriptif

	KOMIN	KOMAU	KEPIN	KEMEN	CI	ETR
Mean	0.424788	3.219697	0.814264	0.032792	0.342139	0.211689
Median	0.400000	3.000000	0.882400	0.000000	0.234550	0.223000
Maximum	0.800000	6.000000	0.999000	0.675600	0.864000	0.815000
Minimum	0.200000	2.000000	0.040600	0.000000	0.000000	-1.952000
Std. Dev.	0.112268	0.543025	0.206772	0.126923	0.269251	0.247897
Skewness	1.114321	2.399429	-2.066161	4.367714	0.664860	-4.839459
Kurtosis	4.929509	9.681418	7.121158	20.56918	2.003599	45.74994
Jarque-Bera	47.79419	372.1872	187.3301	2117.412	15.18534	10566.81
Probability	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000504	0.000000
Sum	56.07200	425.0000	107.4828	4.328600	45.16240	27.94300
Sum Sq. Dev.	1.651128	38.62879	5.600839	2.110330	9.497002	8.050318
Observations	132	132	132	132	132	132

Sumber: Data diolah Eviews 12, 2025

Berdasarkan dari uji analisis statistik deskriptif pada tabel di atas menunjukkan hasil yaitu:

1. Rata-rata variabel komisaris independen (KOMIN) sebesar 0,424788 berarti rata-rata proporsi komisaris independen dalam sampel perusahaan pada penelitian ini sebesar 42%. Rentang nilai KOMIN berkisar antara nilai maksimum sebesar 0,800000 dan nilai minimum sebesar 0,200000. Standar deviasi variabel komisaris independen sebesar 0,112268.
2. Rata-rata variabel komite audit (KOMAU) sebesar 3,219697 yang berarti rata-rata komite audit sekitar 3 orang. Rentang nilai KOMAU berkisar

antara nilai maksimum sebesar 6,000000 dan nilai minimum sebesar 2,000000. Standar deviasi variabel komite audit sebesar 0,5430.

3. Rata-rata variabel kepemilikan institusional (KEPIN) sebesar 0,814264 artinya rata-rata 81% kepemilikan institusional dari kepemilikan keseluruhan. Rentang nilai KEPIN berkisar antara nilai maksimum sebesar 0,999000 dan nilai minimum sebesar 0,040600. Standar deviasi variabel kepemilikan institusional sebesar 0,206772.
4. Rata-rata variabel kepemilikan manajerial (KEMEN) sebesar 0,032792 artinya rata-rata 3% kepemilikan manajerial dari kepemilikan keseluruhan. Rentang nilai KEMEN berkisar antara nilai maksimum sebesar 0,675600 dan nilai minimum sebesar 0,000000. Standar deviasi variabel kepemilikan manajerial sebesar 0,212427.
5. Rata-rata variabel *Capital Intensity* (CI) sebesar 0,342139. Rentang nilai CI berkisar antara nilai maksimum sebesar 0,864000 dan nilai minimum sebesar 0,000000. Standar deviasi variabel sebesar 0,269251.

4.2.2 Uji Pemilihan Model

4.2.2.1 Uji Chow

Bertujuan untuk memilih antara *Common Effect Model* dengan *Fixed Effect Model* yang dilihat dari nilai probabilitas *cross section F*.

Tabel 4. 3 Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	0.584602	(21,105)	0.9209
Cross-section Chi-square	14.595937	21	0.8427

Sumber: data diolah Eviews, 2025

Dari hasil Uji Chow nilai prob sebesar 0,9209 ($> 0,05$), model yang terpilih pada uji chow adalah *Common Effect Model* kemudian dilanjutkan ke LM Test.

4.2.2.2 Uji Lagrange Multiplier (LM Test)

Pengujian ini bertujuan untuk memilih antara *Common Effect Model* atau *Random Effect Model*. Setelah uji chow dilakukan dan terpilih *Common Effect Model*, maka yang diuji selanjutnya adalah LM Test. Sementara itu uji hausman tidak dilakukan karena uji hausman digunakan untuk memilih *Fixed* atau *Random Effect Model*.

Tabel 4. 4 Hasil Uji Lagrange Multiplier

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects

Null hypotheses: No effects

Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided (all others) alternatives

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	2.971248 (0.0848)	0.698769 (0.4032)	3.670017 (0.0554)
Honda	-1.723731 (0.9576)	-0.835924 (0.7984)	-1.809949 (0.9648)
King-Wu	-1.723731 (0.9576)	-0.835924 (0.7984)	-1.507165 (0.9341)
Standardized Honda	-1.124610 (0.8696)	-0.632068 (0.7363)	-5.586101 (1.0000)
Standardized King-Wu	-1.124610 (0.8696)	-0.632068 (0.7363)	-4.594122 (1.0000)
Gourieroux, et al.	--	--	0.000000 (1.0000)

Sumber: Data diolah Eviews 12, 2025

Dari hasil uji Lagrange Multiplier (LM Test) nilai prob. Breusch Pagan sebesar 0,0848 ($> 0,05$) maka model yang terpilih yaitu *Common Effect Model*.

4.2.3 Analisis Regresi Data Panel

Penelitian ini menerapkan *Common Effect Model* berdasarkan hasil uji sebelumnya. Berikut ini hasil uji regresi data panel:

Tabel 4. 5 Hasil Uji Regresi Data Panel

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.742995	0.191582	3.878202	0.0002
KOMIN	0.012243	0.178860	0.068453	0.9455
KOMAU	-0.022621	0.040712	-0.555635	0.5794
KEPIN	-0.418772	0.132502	-3.160497	0.0020
KEMEN	-0.485666	0.227638	-2.133507	0.0348
CI	-0.312007	0.074878	-4.166845	0.0001

Sumber: Data diolah Eviews 12, 2025

Hasil persamaan regresi data panel:

$$ETR = 0.742 + 0.012KOMIN - 0.022KOMA U - 0.418KEPIN - 0.485KEMEN - 0.312CI$$

Berdasarkan model regresi data panel di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta yang diperoleh sebesar 0,742995 bisa diartikan jika variabel independen naik satu satuan secara rerata, maka variabel independen juga akan naik sebesar 0,742995.
2. Variabel komisaris independen (KOMIN) memiliki nilai koefisien 0,012243 yang menunjukkan bahwa setiap perubahan satuan dalam proporsi komisaris independen dapat menghasilkan perubahan *Effective Tax Rate* (ETR) sebesar 0,012243 dengan arah positif. Ini berarti setiap peningkatan proporsi dewan komisaris independen akan meningkatkan nilai ETR.
3. Variabel komite audit (KOMA U) memiliki nilai koefisien -0,022621 yang menandakan bahwa setiap perubahan satuan dalam komite audit dapat menghasilkan perubahan ETR sebesar 0,022621 dengan arah negatif. Dengan begitu semakin besar komite audit maka ETR akan semakin menurun.
4. Variabel kepemilikan institusional (KEPIN) memiliki nilai koefisien -0,418772 yang menandakan bahwa setiap perubahan satuan dalam kepemilikan institusional dapat menghasilkan perubahan ETR sebesar 0,418772 dengan arah negatif. Dengan begitu semakin besar kepemilikan institusional maka ETR akan semakin menurun.
5. Variabel kepemilikan manajerial (KEMEN) memiliki nilai koefisien -0,485666 yang menandakan bahwa setiap perubahan satuan dalam

kepemilikan manajerial dapat menghasilkan perubahan ETR sebesar 0,485666 dengan arah negatif. Dengan begitu semakin besar kepemilikan manajerial maka ETR akan semakin menurun.

6. Variabel *Capital Intensity* (CI) memiliki nilai koefisien -0,312007 yang menandakan bahwa setiap perubahan satuan dalam kepemilikan manajerial dapat menghasilkan perubahan ETR sebesar 0,312007 dengan arah negatif. Dengan begitu semakin besar *capital intensity* maka ETR akan semakin menurun.

4.2.4 Uji Asumsi Klasik

Model yang terpilih adalah *Common Effect Model* (CEM). Oleh karena itu uji asumsi klasik yang digunakan adalah multikolinearitas dan heteroskedastisitas, karena tidak semua uji asumsi klasik harus dilakukan pada setiap model regresi linier dengan pendekatan OLS (Basuki, 2023).

4.2.4.1 Uji Multikolinearitas

Tujuan uji multikolinieritas adalah untuk menemukan adanya korelasi antar variabel independen dalam model regresi, karena seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel independen agar menjadi model regresi yang baik. Berikut ini merupakan hasil uji multikolinearitas:

Tabel 4. 6 Hasil Uji Multikolinearitas

	KOMIN	KOMAU	KEPIN	KEMEN	CI
KOMIN	1.000000	0.005528	-0.011513	0.082978	-0.028651
KOMAU	0.005528	1.000000	-0.306048	0.422882	-0.116896
KEPIN	-0.011513	-0.306048	1.000000	-0.682977	0.100434
KEMEN	0.082978	0.422882	-0.682977	1.000000	-0.110880
CI	-0.028651	-0.116896	0.100434	-0.110880	1.000000

Sumber: Data diolah Eviews 12, 2025

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas di atas, nilai korelasi antar variabel independen dalam penelitian kurang dari 0,80 artinya data pada penelitian ini tidak terdapat masalah multikolinearitas.

4.2.4.2 Uji Heterokedastisitas

Tujuan uji heteroskedastisitas adalah untuk menguji apakah terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain dalam model regresi (Ghozali, 2013). Pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan uji Glejser yang ditandai dengan nilai p-Value dari chi-square pada pengujian yang lebih kecil dari $\alpha = 0,05$. Di bawah ini adalah hasil pengujiannya:

Tabel 4. 7 Hasil Uji Heterokedastisitas

Dependent Variable: ABS_RES
Method: Panel Least Squares
Date: 07/28/25 Time: 14:12
Sample: 2019 2024
Periods included: 6
Cross-sections included: 22
Total panel (balanced) observations: 132

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.117439	0.164283	0.714857	0.4760
KOMIN	0.209704	0.155838	1.345658	0.1808
KOMAU	-0.013041	0.035375	-0.368640	0.7130
KEPIN	-0.067212	0.115416	-0.582342	0.5614
KEMEN	-0.178363	0.198312	-0.899409	0.3701

Sumber: data diolah eviews, 2025

Berdasarkan hasil uji heterokedastisitas di atas, nilai probabilitas dari masing-masing variabel independen lebih besar dari 0,05 artinya data pada penelitian ini bebas dari gejala heterokedastisitas.

4.2.5 Uji Hipotesis

4.2.5.1 Uji F

Uji f atau uji simultan dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen.

Tabel 4. 8 Hasil Uji F

Prob(F-statistic)	0,000096
-------------------	----------

Sumber: Data diolah Eviews 12, 2025

Berdasarkan tabel di atas nilai prob(F-statistic) sebesar $0,000096 < 0,05$ artinya variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

4.2.5.2 Uji T

Tujuan uji t adalah untuk membuktikan secara individu apakah variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Jika nilai Sig. < 0,05 berkesimpulan ada pengaruh secara signifikan.

Tabel 4. 9 Hasil Uji T

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.	Kesimpulan
C	0.742995	0.191582	3.878202	0.0002	
KOMIN	0.012243	0.178860	0.068453	0.9455	H ₁ ditolak
KOMAU	-0.022621	0.040712	-0.555635	0.5794	H ₂ ditolak
KEPIN	-0.418772	0.132502	-3.160497	0.0020	H ₃ diterima
KEMEN	-0.485666	0.227638	-2.133507	0.0348	H ₄ diterima
CI	-0.312007	0.074878	4.166845	0.0001	H ₅ ditolak

Sumber: Data diolah Eviews 12, 2025

Berdasarkan tabel didapatkan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Hipotesis pertama, pengaruh komisaris independen (KOMIN) terhadap *tax avoidance* mempunyai nilai probabilitas sebesar $0,9455 > 0,05$ dengan koefisien 0,012243 berarti hipotesis ditolak maka variabel komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
2. Hipotesis kedua, pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance* mempunyai nilai probabilitas sebesar $0,5794 > 0,05$ dengan koefisien -0,022621. Jadi hipotesis ditolak artinya variabel komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
3. Hipotesis ketiga, pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* mempunyai nilai signifikan sebesar $0,0020 > 0,05$ dengan

koefisien -0,418772 artinya hipotesis diterima, maka variabel kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

4. Hipotesis keempat, pengaruh kepemilikan manajerial terhadap *tax avoidance* mempunyai nilai signifikan sebesar 0,0348 dengan koefisien -0,485666 berarti hipotesis diterima, maka variabel kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.
5. Hipotesis kelima, pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance* mempunyai nilai signifikan sebesar 0,0001 dengan koefisien -0,312007 artinya hipotesis ditolak, maka variabel *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

4.2.5.2 Uji Koefisien Determinasi

Tujuan uji koefisien determinasi (R^2) adalah untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Jika nilai koefisien determinasi kecil artinya kemampuan variabel independen dalam menjalankan variabel dependen sangat terbatas.

Tabel 4. 10 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Adjusted R-square	0,150997
-------------------	----------

Sumber: Data diolah Eviews 12, 2025

Hasil uji R^2 di atas menunjukkan nilai *adjusted R-square* 0,150997 berarti sumbangan pengaruh variabel independen dan variabel kontrol terhadap variabel dependen secara simultan (bersama-sama) sebesar 15% terhadap *tax avoidance*.

4.2.6 Pembahasan

4.2.6.1 Pengaruh Komisaris Independen terhadap *Tax avoidance*

Berdasarkan hasil uji yang sudah dilakukan, komisaris independen mempunyai nilai koefisien sebesar 0.012243. Nilai *t-statistic* sebesar 0.068453 dengan nilai probabilitas sebesar 0.9455 yang berarti lebih dari 0,05 dan ini menunjukkan bahwa pengaruh komisaris independen tidak signifikan. Berdasarkan hasil penelitian, hipotesis pertama ditolak yang berarti komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian oleh Murtina et al., (2022); Purbowati, (2021); Yulianty et al., (2021); Ubaidillah, (2021). Proporsi dewan komisaris yang tinggi belum tentu diikuti oleh penurunan perilaku penghindaran pajak. Banyaknya proporsi dewan komisaris independen terhadap seluruh jumlah dewan komisaris dalam penelitian ini belum mampu membuktikan adanya pengaruh dalam menurunkan tindakan penghindaran pajak. Dewan komisaris independen

Namun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proporsi komisaris independen dalam suatu perusahaan tidak terbukti efektif mengurangi praktik penghindaran pajak. Hal ini berarti keberadaan komisaris independen hanya memenuhi syarat regulasi dan tidak bisa menjamin kinerja. Dengan begitu ini tidak sesuai dengan teori agensi artinya terdapat perbedaan antara teori dan praktik di lapangan. Menurut teori agensi, komisaris independen berperan sebagai pengawas yang mengawasi

tindakan manajemen, termasuk mencegah praktik penghindaran pajak yang dapat menimbulkan reputasi negatif perusahaan (Yulianty et al., 2021).

Ini menunjukkan pengawasan manajemen yang dilakukan oleh komisaris independen dalam mencegah praktik penghindaran pajak ditentukan oleh tingkat independensi, integritas, dan efektivitas mereka dalam melaksanakan fungsi pengawasan. Oleh karena itu, memiliki banyak komisaris independen dalam struktur tata kelola perusahaan tidak secara otomatis meningkatkan efektivitas pengawasan jika tidak disertai dengan sumber daya yang memadai dan komitmen terhadap prinsip tata kelola (Ubaidillah, 2021). Hal ini dapat disimpulkan bahwa semakin banyak dewan komisaris independen dalam suatu perusahaan tidak menunjukkan adanya perubahan terhadap tindakan penghindaran pajak.

4.2.6.2 Pengaruh Komite Audit terhadap *Tax avoidance*

Berdasarkan hasil uji yang sudah dilakukan, komite audit mempunyai nilai koefisien sebesar -0.022621. Nilai *t-statistic* sebesar -0.555635 dengan nilai probabilitas 0.5794 yang berarti lebih besar dari signifikansi 0,05 dan ini menunjukkan bahwa pengaruh komite audit tidak signifikan. Berdasarkan hasil penelitian, hipotesis kedua ditolak yang berarti komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian oleh Jusman & Nosita, (2020); Purbowati, (2021); Yulianty et al., (2021); Nur'aini & Sherlita, (2023). Banyaknya jumlah komite audit belum tentu diikuti penurunan perilaku penghindaran pajak. Dalam pedoman dan pembentukan

pelaksanaan komite audit diatur bahwa paling sedikit komite audit terdiri dari tiga orang (Yulianty et al., 2021). Meskipun rata-rata jumlah komite audit perusahaan sampel sudah memenuhi jumlah minimum yang diatur yaitu terdiri dari tiga orang tetapi hasil penelitian belum mengkonfirmasi asumsi yang ada dalam teori agensi. Dalam teori agensi yang mana komite audit sebagai pendukung dewan komisaris independen dalam membantu melakukan tugas pengawasan terhadap tindakan manajer termasuk dalam meminimalkan penghindaran pajak (Yulianty et al., 2021). Dengan begitu diharapkan komite audit berfungsi dengan baik sehingga konflik kepentingan dan asimetri informasi antara pemegang saham dan manajer dapat berkurang.

Namun berdasarkan hasil penelitian ini, jumlah komite audit tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa besar kecilnya jumlah komite audit tidak memiliki pengaruh apapun dalam upaya penghindaran pajak suatu perusahaan, karena kecenderungan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak bukan dilihat dari jumlah komite audit melainkan kualitas kerja dari komite audit itu sendiri (Purbowati, 2021). Oleh karena itu, penting untuk diingat bahwa jumlah anggota komite audit bukanlah faktor utama dalam menekan praktik pencegahan pajak; yang lebih penting adalah bagaimana komite audit menjalankan tugas pengawasan mereka. Jika komite audit hanya hadir secara administratif, mereka tidak akan mampu mendeteksi atau mencegah strategi penghindaran pajak manajemen. Oleh karena itu, temuan ini

menunjukkan bahwa meningkatkan kualitas kinerja dan kemampuan komite audit lebih penting daripada meningkatkan jumlah anggota.

4.2.6.3 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *Tax avoidance*

Berdasarkan hasil uji yang sudah dilakukan, kepemilikan institusional mempunyai nilai koefisien sebesar -0.418772. Nilai *t-statistic* sebesar -3.160497 dengan nilai probabilitas sebesar 0.0020 yang berarti kurang dari 0,05 dan ini menunjukkan bahwa pengaruh kepemilikan institusional signifikan. Berdasarkan hasil penelitian, hipotesis ketiga diterima yang berarti kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian oleh Nur'aini & Sherlita, (2023); Purbowati, (2021); Oktaviana & Kholis, (2021); Murtina et al., (2022); Nabila & Kartika, (2023). Tingginya persentase kepemilikan saham oleh institusi diikuti dengan penurunan perilaku penghindaran pajak. Ini berarti ketika investor institusional memiliki lebih banyak saham dalam perusahaan, mereka akan lebih mengawasi kinerja manajemen. Sesuai dengan teori yang dijelaskan yang menyatakan kepemilikan institusional yang tinggi berpengaruh menekan perilaku penghindaran pajak. Dengan adanya kepemilikan oleh investor institusional seperti perusahaan efek, perusahaan asuransi, perbankan, perusahaan investasi, dana pensiun, dan kepemilikan institusi lain akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal (Sulistiyan & Nugraha, 2019).

Dalam teori agensi dijelaskan kepemilikan institusional berperan sebagai mekanisme pengawasan yang mengurangi konflik kepentingan akibat asimetri informasi. Semakin besar maka hak dan suaranya untuk memonitor kerja manajemen semakin besar, yang artinya semakin tingginya kepemilikan institusional dalam perusahaan maka membuat praktik *tax avoidance* semakin rendah (Murtina et al., 2022). Perusahaan yang kepemilikan institusional tinggi biasanya lebih transparan dalam menyusun laporan keuangannya, karena ruang gerak manajemen untuk melakukan praktik manipulatif, termasuk menghindari pajak menjadi lebih sempit. Dengan begitu, seiring dengan peningkatan kepemilikan institusional maka praktik penghindaran pajak akan menjadi lebih sedikit.

4.2.6.4 Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap *Tax avoidance*

Berdasarkan hasil uji yang sudah dilakukan, kepemilikan manajerial mempunyai nilai koefisien sebesar -0.485666. Nilai *t-statistic* sebesar -2.133507 dengan nilai probabilitas sebesar 0.0348 yang berarti kurang dari 0,05 dan ini menunjukkan bahwa pengaruh kepemilikan manajerial signifikan. Berdasarkan hasil penelitian, hipotesis keempat diterima yang berarti kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian oleh Agustyo & Arianti, (2024); Nurmawan & Nuritomo, (2022); Rahmad et al., (2025). Adanya kepemilikan manajerial dalam persentase kepemilikan saham perusahaan mengakibatkan penurunan perilaku penghindaran pajak. Jika saham yang dimiliki oleh manajemen tinggi maka manajemen akan lebih

berhati-hati melakukan tindakan yang menimbulkan resiko pada perusahaan.

Dalam teori agensi yang mana kepemilikan manajerial dapat mengurangi konflik kepentingan antara manajemen sebagai agen dan pemegang saham sebagai principal. Konflik kepentingan ini biasa muncul diakibatkan manajemen cenderung memiliki kepentingan jangka pendek untuk memperoleh keuntungan pribadi, sedangkan pemegang saham menginginkan keberlangsungan perusahaan dan keuntungan jangka panjang. Karena pihak manajemen juga memiliki saham maka manajemen menjadi bagian dari pemilik perusahaan, ini membuat tujuan pemegang saham akan selaras sehingga manajemen akan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan, termasuk dalam perpajakan (Septanta, 2023).

Selain itu, kepemilikan manajerial dapat membantu manajer merasa lebih bertanggung jawab. Manajer yang memiliki saham akan lebih terdorong untuk menjaga kinerja dan reputasi perusahaan dalam jangka panjang (Rahmad et al., 2025). Manajer yang sekaligus menjadi pemegang saham cenderung memilih strategi yang tidak menimbulkan risiko yang signifikan bagi bisnis mereka. Penghindaran pajak memberikan keuntungan finansial dalam jangka pendek, tetapi juga memiliki risiko besar, seperti sanksi hukum, pemeriksaan pajak, dan kerusakan reputasi perusahaan di mata investor dan publik. Dengan begitu semakin tingginya kepemilikan manajerial dalam perusahaan maka membuat praktik penghindaran pajak semakin rendah.

4.2.6.5 Pengaruh *Capital Intensity* terhadap *Tax avoidance*

Berdasarkan hasil uji yang sudah dilakukan, variabel *capital intensity* mempunyai nilai koefisien sebesar -0.312007. Nilai *t-statistic* sebesar 4.166845 dengan nilai probabilitas sebesar 0.0001 yang berarti kurang dari 0,05. Berdasarkan hasil penelitian, hipotesis kelima ditolak yang berarti *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian oleh Anggriantari & Purwantini, (2020); Efendi & Winingrum, (2025); Agustyo & Arianti, (2024). Besarnya aset tetap yang dimiliki perusahaan digunakan untuk kepentingan operasional dan investasi bukan untuk penghindaran pajak (Anggriantari & Purwantini, 2020). Ini artinya perusahaan bukan sengaja menyimpan proporsi aset untuk menghindari pajak melainkan memang sesuai tujuannya untuk operasional perusahaan. Proporsi aset tetap yang besar pada perusahaan bukan strategi manajemen untuk menghindari pajak, melainkan memang digunakan untuk kebutuhan strategis dan efisiensi operasional perusahaan dengan proporsi aset yang besar.

Hasil ini tidak sesuai dengan teori keagenan, karena menurut teori keagenan manajer melakukan investasi pada aset tetap untuk mengurangi beban pajak dengan memanfaatkan penyusutan aset tetap untuk menekan beban pajak (Sari & Indrawan, 2022). Dalam teori ini, semakin tinggi tingkat investasi perusahaan pada aset tetap maka semakin besar peluang manajer untuk menggunakan penyusutan sebagai sarana upaya melakukan penghindaran pajak. Namun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa

meskipun teori agensi berpendapat bahwa intensitas aset berkorelasi positif dengan penghindaran pajak, aset tetap lebih banyak diperlakukan sesuai fungsinya daripada sebagai instrumen penghindaran pajak. Oleh karena itu variabel *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
2. Komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
3. Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.
4. Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.
5. *Capital intensity* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

5.2 Keterbatasan

Keterbatasan yang ada dalam penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sehingga hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisasi pada perusahaan di sektor lain.
2. Koefisien determinasi pada penelitian ini menunjukkan angka sebesar 0,15 atau 15%. Sedangkan sisanya sebesar 85% dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian.

5.3 Saran

Berasal dari keterbatasan yang sudah diuraikan di atas maka berikut saran yang bisa diberikan peneliti:

1. Disarankan menggunakan sektor perusahaan lain sebagai objek dan memperluas periode tahun penelitian.
2. Dikarenakan nilai koefisien determinasi yang masih rendah, penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain yang belum digunakan dalam penelitian ini.

5.4 Implikasi

Hasil penelitian ini bisa dijadikan pertimbangan untuk beberapa pihak seperti:

1. Bagi pemerintah dan otoritas pajak, hasil penelitian ini bisa menjadi masukan dalam menyusun kebijakan pengawasan dan regulasi perpajakan.
2. Bagi perusahaan, penelitian ini memberikan pemahaman bahwa praktik *corporate governance* yang baik bukan hanya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, tetapi juga mampu menekan kecenderungan manajemen melakukan penghindaran pajak yang berisiko terhadap reputasi perusahaan.
3. Bagi investor, penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menilai kinerja dan tata kelola perusahaan, karena tax avoidance dapat menimbulkan risiko jangka panjang, baik secara hukum maupun reputasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustyo, B. A., & Arianti, B. F. (2024). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Kepemilikan Manajerial, Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance. *Gorontalo Accounting Journal*, 7(1), 1.
<https://doi.org/10.32662/gaj.v7i1.3168>
- Anggriantari, C. D., & Purwantini, A. H. (2020). Business and Economics Conference in Utilization of Modern Technology Magelang. *Business and Economics Conference in Utilization of Modern Technology*, 137–153.
- Asmara, C. G. (2019). *No Title*. CNBC Indonesia.
<https://www.cnbcindonesia.com/market/20190708190803-17-83487/soal-pajak-adaro-sri-mulyani-selama-ini-sudah-transparan>
- Basuki, A. T. (2023). *Analisis Data Panel Dalam Penelitian Ekonomi Dan Bisnis (Dilengkapi dengan Penggunaan Eviews)*.
- Bella, P. L., & Machdar, N. M. (2025). Dampak Liquidity dan Capital Intensity terhadap Tax Avoidance. *Ekonomi Keuangan Syariah Dan Akuntansi Pajak (EKSAP)*, 2(1), 21–32.
- Darsani, P. A., & Sukartha, I. M. (2021). The Effect of Institutional Ownership, Profitability, Leverage and Capital Intensity Ratio on Tax Avoidance. *American Journal of Humanities and Social Sciences Research*, 5(5), 13–22.
www.ajhssr.com
- Efendi, M., & Winingrum, S. P. (2025). Pengaruh Struktur Modal, Capital Intensity, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS)*, 5(1), 269–280.
<https://doi.org/10.47233/jebs.v5i1.2496>
- Febriyanto, M. I., Hamzah, R., Sari, W., & Suripto. (2023). Pengaruh Capital Intensity dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang*, 11, 114–130.
<https://doi.org/10.47233/jebs.v5i1.2496>
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25* (9th ed.).
- Hardana, A., & Hasibuan, A. N. (2023). The Impact of Probability, Transfer Pricing, and Capital Intensity on Tax Avoidance When Listed Companies in the Property and Real Estate Sub Sectors on the Indonesia Stock Exchange. *International Journal of Islamic Economics*, 5(01), 67.
<https://doi.org/10.32332/ijie.v5i01.6991>
- Harianto, R. (2020). Pengaruh Strategi Bisnis, Kepemilikan Institusional dan Kebijakan Utang terhadap Penghindaran Pajak (Studi Kasus Pada Perusahaan Makanan dan Minuman di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2018). *Liability*, 02(1), 49–69.

- Jensen, M. C., & Meckling, W. A. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*. [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Jusman, J., & Nosita, F. (2020). Pengaruh Corporate Governance, Capital Intensity dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance pada Sektor Pertambangan. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(2), 697. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i2.997>
- Lukviarman, N. (2016). *Corporate Governance*. Era Adicitra Intermedia.
- Moeljono, M. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak. *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, 5(1), 103–121. <https://doi.org/10.33633/jpeb.v5i1.2645>
- Murtina, W. S., Putra, W. E., & Yustien, R. (2022). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) (Studi Empiris Perusahaan Perbankan Terdaftar di BEI Tahun 2015-2019). *Jurnal Akuntansi Dan Auditing*, 17(2), 47–66. <https://doi.org/10.14710/jaa.17.2.47-66>
- Nabila, K., & Kartika, A. (2023). Pengaruh Capital Intensity dan Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 7(1), 591. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v7i1.746>
- Nur'aini, D. S., & Sherlita, E. (2023). Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance. *Media Ilmiah Akuntansi*, 10(1), 43–56. <https://doi.org/10.34208/mia.v10i1.20>
- Nurmawan, M., & Nuritomo. (2022). Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Penghindaran Pajak. *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, 4(1976), 5–11. <https://doi.org/10.20885/ncaf.vol4.art2>
- Oktaviana, D., & Kholis, N. (2021). Corporate Governance dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak. Bagaimana Pengaruhnya? *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 23(2), 217–228. <http://jurnaltsm.id/index.php/JBA>
- Pohan, C. A. (2013). *Manajemen Perpajakan, Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Pratiwi S, R. Y. (2022). *Macam-Macam Praktik Penghindaran Pajak*. Pajak.Com. <https://www.pajak.com/pajak/macam-macam-praktik-penghindaran-pajak/>
- Purbowati, R. (2021). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Penghindaran Pajak). *JAD : Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan Dewantara*, 4(1), 59–73. <https://doi.org/10.26533/jad.v4i1.755>
- Putri, C. (2023). *Laporan Tax Ratio 2023, Beneran Melempem Bu Sri Mulyani?* CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230125140034-4-408161/laporan-tax-ratio-2023-beneran-melempem-bu-sri-mulyani>
- Rahmad, S., Hernawan, & Rusliyawati. (2025). *Pengaruh Kepemilikan*

Manajerial Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi. 14, 21–33.
<https://doi.org/10.26418/jaakfe.v14i1.62506>

- Rasmita, N. U. (2020). Pengaruh Corporate Governance dan Leverage terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*.
- Sahara, L. I. (2022). Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, Kualitas Audit Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance Dengan Karakter Eksekutif Sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan Lq 45 Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business*, 5(3), 507–515.
- Sari, M. R., & Indrawan, I. G. A. (2022). Pengaruh kepemilikan instutional, capital intensity dan inventory intensity terhadap Tax Avoidance. *Owner*, 6(4), 4037–4049. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1092>
- Septanta, R. (2023). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business*, 6(1), 95–104.
<https://doi.org/10.37481/sjr.v6i1.623>
- Setiawan, A. D., Wasif, S. K., Husen, I. A., Yuliansyah, R., & Pebriani, W. (2021). Jurnal Inovasi Penelitian. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(1), 305–3018.
- Simanjuntak, S. D. A. (2025). *Ratio Tax 2024 Turun, Ditjen Pajak Siap Buru Pengemplang Pajak*. Bisnis.Com.
<https://ekonomi.bisnis.com/read/20250209/259/1838029/ratio-tax-2024-turun-ditjen-pajak-siap-buru-pengemplang-pajak>
- Suciarti, C., Suryani, E., & Kurnia, K. (2020). The Effect of Leverage, Capital Intensity and Deferred Tax Expense on Tax Avoidance. *Journal of Accounting Auditing and Business*, 3(2), 76–83.
<https://doi.org/10.24198/jaab.v3i2.28624>
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta Bandung.
- Sulistiyan, U., & Nugraha, R. A. Z. (2019). Corporate Ownership, Karakteristik Eksekutif, dan Intensitas Aset Tetap Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Profita*, 12(3), 361. <https://doi.org/10.22441/profita.2019.v12.03.001>
- Tanjaya, C., & Nazir, N. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 8(2), 189–208.
- Theodora, A. (2023). *Rasio pajak masih rendah, upaya mencegah kebocoran diperkuat*. Kompas.Id.
<https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/05/03/rasio-pajak-masih-rendah-upaya-mencegah-kebocoran-diperkuat>

- Ubaidillah, M. (2021). Tax Avoidance: Good Corporate Governance (Studi Kasus Perusahaan Pertambangan Terdaftar di BEI 2015-2018). *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 5(1), 152–163.
- Warsono, S., Amalia, F., & Raharja, D. K. (2009). *Coporate Governace Concept And Model: Preserving True Organization Welfare*. Center for Good Corporate.
- Widyastuti, S. M., Meutia, I., & Candrakanta, A. B. (2022). the Effect of Leverage, Profitability, Capital Intensity and Corporate Governance on Tax Avoidance. *Integrated Journal of Business and Economics*, 6(1), 13. <https://doi.org/10.33019/ijbe.v6i1.391>
- Yulianty, A., Ermania Khrisnatika, M., & Firmansyah, A. (2021). Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Pertambangan Di Indonesia: Profitabilitas, Tata Kelola Perusahaan, Intensitas Persediaan, Leverage. *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 5(1), 20–31. <https://doi.org/10.31092/jpi.v5i1.1201>

LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Perusahaan Sampel

No.	Kode	Perusahaan
1	ADRO	Alamtri Resources Indonesia Tbk
2	AKRA	AKR Corporindo Tbk.
3	BSSR	Baramulti Suksessarana Tbk.
4	BYAN	Bayan Resources Tbk.
5	ELSA	Elnusa Tbk.
6	ENRG	Energi Mega Persada Tbk.
7	GEMS	Golden Energy Mines Tbk.
8	HRUM	Harum Energy Tbk.
9	ITMG	Indo Tambangraya Megah Tbk.
10	MBAP	Mitrabara Adiperdana Tbk.
11	MYOH	Samindo Resources Tbk.
12	PSSI	PT IMC Pelita Logistik Tbk
13	PTBA	Bukit Asam Tbk.
14	PTIS	Indo Straits Tbk
15	PTRO	Petrosea Tbk
16	RAJA	Rukun Raharja Tbk.
17	RUIS	Radiant Utama Interinsco Tbk.
18	SHIP	Sillo Maritime Perdana Tbk.
19	SOCI	Soechi Lines Tbk.
20	TCPI	Transcoal Pacific Tbk.
21	TPMA	Trans Power Marine Tbk.
22	TOBA	TBS Energi Utama Tbk.

Lampiran 2. Variabel Komisaris Independen

No.	Kode	Tahun	Jumlah komisaris independen	Jumlah anggota dewan komisaris	KOMIN
1	ADRO	2019	2	5	0.400
		2020	2	5	0.400
		2021	2	5	0.400
		2022	2	5	0.400
		2023	2	5	0.400
		2024	2	5	0.400
2	AKRA	2019	1	3	0.333
		2020	1	3	0.333
		2021	1	3	0.333
		2022	1	3	0.333
		2023	1	3	0.333
		2024	1	3	0.333
3	BSSR	2019	3	8	0.375
		2020	3	8	0.375
		2021	3	8	0.375
		2022	3	8	0.375
		2023	3	8	0.375
		2024	3	8	0.375
4	BYAN	2019	2	5	0.400
		2020	2	5	0.400
		2021	2	4	0.500
		2022	2	4	0.500
		2023	3	6	0.500
		2024	3	6	0.500
5	ELSA	2019	2	5	0.400
		2020	2	4	0.500
		2021	2	4	0.500
		2022	2	4	0.500
		2023	2	4	0.500
		2024	2	4	0.500
6	ENRG	2019	3	5	0.600
		2020	3	5	0.600
		2021	2	5	0.400

		2022	2	5	0.400
		2023	2	6	0.333
		2024	2	6	0.333
7	GEMS	2019	3	6	0.500
		2020	2	5	0.400
		2021	3	6	0.500
		2022	2	6	0.333
		2023	2	6	0.333
		2024	2	6	0.333
8	HRUM	2019	2	6	0.333
		2020	2	6	0.333
		2021	2	5	0.400
		2022	2	5	0.400
		2023	2	5	0.400
		2024	2	5	0.400
9	ITMG	2019	3	6	0.500
		2020	3	7	0.429
		2021	3	7	0.429
		2022	3	8	0.375
		2023	3	8	0.375
		2024	3	10	0.300
10	MBAP	2019	1	3	0.333
		2020	1	3	0.333
		2021	1	3	0.333
		2022	1	2	0.500
		2023	1	2	0.500
		2024	1	2	0.500
11	MYOH	2019	1	3	0.333
		2020	1	3	0.333
		2021	1	3	0.333
		2022	1	3	0.333
		2023	1	3	0.333
		2024	2	4	0.500
12	PSSI	2019	1	4	0.250
		2020	1	4	0.250
		2021	1	5	0.200
		2022	1	3	0.333
		2023	1	3	0.333
		2024	2	4	0.500

13	PTBA	2019	2	6	0.333
		2020	2	6	0.333
		2021	2	6	0.333
		2022	2	6	0.333
		2023	3	6	0.500
		2024	3	6	0.500
14	PTIS	2019	1	2	0.500
		2020	1	2	0.500
		2021	1	2	0.500
		2022	1	2	0.500
		2023	1	2	0.500
		2024	1	2	0.500
15	PTRO	2019	2	5	0.400
		2020	2	5	0.400
		2021	2	5	0.400
		2022	4	9	0.444
		2023	2	6	0.333
		2024	2	6	0.333
16	RAJA	2019	1	4	0.250
		2020	1	4	0.250
		2021	1	4	0.250
		2022	1	3	0.333
		2023	3	5	0.600
		2024	3	5	0.600
17	RUIS	2019	1	3	0.333
		2020	1	3	0.333
		2021	1	3	0.333
		2022	1	3	0.333
		2023	1	3	0.333
		2024	1	3	0.333
18	SHIP	2019	1	2	0.500
		2020	1	2	0.500
		2021	1	2	0.500
		2022	1	2	0.500
		2023	1	2	0.500
		2024	1	3	0.333
19	SOCI	2019	1	3	0.333
		2020	1	3	0.333
		2021	1	2	0.500

		2022	1	2	0.500
		2023	1	2	0.500
		2024	1	2	0.500
20	TCPI	2019	1	2	0.500
		2020	1	2	0.500
		2021	1	2	0.500
		2022	1	2	0.500
		2023	1	2	0.500
		2024	1	2	0.500
21	TPMA	2019	1	3	0.333
		2020	1	3	0.333
		2021	1	3	0.333
		2022	1	2	0.500
		2023	1	2	0.500
		2024	1	2	0.500
22	TOBA	2019	2	3	0.667
		2020	2	3	0.667
		2021	4	5	0.800
		2022	4	5	0.800
		2023	4	5	0.800
		2024	4	5	0.800

Lampiran 3. Variabel Komite Audit

No.	Kode	Tahun	Jumlah Komite Audit
1	ADRO	2019	3
		2020	3
		2021	3
		2022	3
		2023	3
		2024	3
2	AKRA	2019	3
		2020	3
		2021	3
		2022	3
		2023	3
		2024	3
3	BSSR	2019	3
		2020	3
		2021	3
		2022	3
		2023	3
		2024	2
4	BYAN	2019	4
		2020	4
		2021	4
		2022	4
		2023	5
		2024	5
5	ELSA	2019	3
		2020	3
		2021	3
		2022	3
		2023	3
		2024	3
6	ENRG	2019	3
		2020	3
		2021	3
		2022	3
		2023	3

		2024	3
7	GEMS	2019	3
		2020	3
		2021	3
		2022	3
		2023	3
		2024	3
8	HRUM	2019	3
		2020	3
		2021	3
		2022	3
		2023	3
		2024	3
9	ITMG	2019	4
		2020	4
		2021	4
		2022	4
		2023	4
		2024	4
10	MBAP	2019	3
		2020	3
		2021	3
		2022	3
		2023	3
		2024	3
11	MYOH	2019	3
		2020	3
		2021	3
		2022	3
		2023	3
		2024	3
12	PSSI	2019	3
		2020	3
		2021	3
		2022	3
		2023	3
		2024	3
13	PTBA	2019	4
		2020	4
		2021	4

		2022	4
		2023	4
		2024	4
14	PTIS	2019	3
		2020	3
		2021	3
		2022	3
		2023	3
		2024	3
15	PTRO	2019	3
		2020	5
		2021	5
		2022	6
		2023	4
		2024	4
16	RAJA	2019	3
		2020	3
		2021	3
		2022	3
		2023	3
		2024	4
17	RUIS	2019	3
		2020	3
		2021	3
		2022	3
		2023	3
		2024	3
18	SHIP	2019	3
		2020	3
		2021	3
		2022	3
		2023	3
		2024	3
19	SOCI	2019	3
		2020	3
		2021	3
		2022	3
		2023	3
		2024	3
20	TCPI	2019	3

		2020	3
		2021	3
		2022	3
		2023	3
		2024	3
21	TPMA	2019	3
		2020	3
		2021	3
		2022	3
		2023	3
		2024	3
22	TOBA	2019	3
		2020	3
		2021	3
		2022	3
		2023	3
		2024	3

Lampiran 4. Variabel Kepemilikan Institusional

No.	Kode	Tahun	Kepemilikan Intitusional
1	ADRO	2019	0.7963
		2020	0.7824
		2021	0.8069
		2022	0.7982
		2023	0.7837
		2024	0.7743
2	AKRA	2019	0.9602
		2020	0.9340
		2021	0.9538
		2022	0.9623
		2023	0.9563
		2024	0.9514
3	BSSR	2019	0.9507
		2020	0.9507
		2021	0.9508
		2022	0.9313
		2023	0.9299
		2024	0.9273
4	BYAN	2019	0.3000
		2020	0.3000
		2021	0.1000
		2022	0.1000
		2023	0.1000
		2024	0.1000
5	ELSA	2019	0.8090
		2020	0.7130
		2021	0.6100
		2022	0.6660
		2023	0.6930
		2024	0.7530
6	ENRG	2019	0.5032
		2020	0.6113
		2021	0.8064
		2022	0.8799
		2023	0.8801

		2024	0.8733
7	GEMS	2019	0.9988
		2020	0.9988
		2021	0.9990
		2022	0.9983
		2023	0.9950
		2024	0.9960
8	HRUM	2019	0.9100
		2020	0.9288
		2021	0.9471
		2022	0.9193
		2023	0.9316
		2024	0.9230
9	ITMG	2019	0.9071
		2020	0.8368
		2021	0.8843
		2022	0.8815
		2023	0.8555
		2024	0.8623
10	MBAP	2019	0.9429
		2020	0.9434
		2021	0.9455
		2022	0.9463
		2023	0.9480
		2024	0.9466
11	MYOH	2019	0.7972
		2020	0.8063
		2021	0.8129
		2022	0.8150
		2023	0.8150
		2024	0.8077
12	PSSI	2019	0.9620
		2020	0.9617
		2021	0.9767
		2022	0.9773
		2023	0.9784
		2024	0.9775
13	PTBA	2019	0.9451
		2020	0.9041
		2021	0.8918

		2022	0.8972
		2023	0.8938
		2024	0.8694
14	PTIS	2019	0.9105
		2020	0.9101
		2021	0.9164
		2022	0.9107
		2023	0.9107
		2024	0.9090
15	PTRO	2019	0.7415
		2020	0.7450
		2021	0.7479
		2022	0.9357
		2023	0.9198
		2024	0.8803
16	RAJA	2019	0.4319
		2020	0.4084
		2021	0.3656
		2022	0.5723
		2023	0.6399
		2024	0.6174
17	RUIS	2019	0.0406
		2020	0.5726
		2021	0.5714
		2022	0.5747
		2023	0.5727
		2024	0.5622
18	SHIP	2019	0.9917
		2020	0.9917
		2021	0.9884
		2022	0.9892
		2023	0.9926
		2024	0.9927
19	SOCI	2019	0.8118
		2020	0.8120
		2021	0.8073
		2022	0.8120
		2023	0.8179
		2024	0.8436
20	TCPI	2019	0.8589

		2020	0.8672
		2021	0.8982
		2022	0.8595
		2023	0.8833
		2024	0.8971
21	TPMA	2019	0.9457
		2020	0.9510
		2021	0.8624
		2022	0.8307
		2023	0.8125
		2024	0.7117
22	TOBA	2019	0.9552
		2020	0.9553
		2021	0.9573
		2022	0.9146
		2023	0.8343
		2024	0.8360

Lampiran 5. Variabel Kepemilikan Manajerial

No.	Kode	Tahun	Kepemilikan Manajerial
1	ADRO	2019	0.06320
		2020	0.06310
		2021	0.06300
		2022	0.06290
		2023	0.06294
		2024	0.06514
2	AKRA	2019	0.00675
		2020	0.00398
		2021	0.00893
		2022	0.01099
		2023	0.01244
		2024	0.01280
3	BSSR	2019	0.00098
		2020	0.00098
		2021	0.00000
		2022	0.00000
		2023	0.00000
		2024	0.00000
4	BYAN	2019	0.59710
		2020	0.59870
		2021	0.61470
		2022	0.67404
		2023	0.67561
		2024	0.46668
5	ELSA	2019	0.00000
		2020	0.00000
		2021	0.00000
		2022	0.00000
		2023	0.00000
		2024	0.00000
6	ENRG	2019	0.00000
		2020	0.00000
		2021	0.00000
		2022	0.00000
		2023	0.00000

		2024	0.00000
7	GEMS	2019	0.00000
		2020	0.00000
		2021	0.00000
		2022	0.00000
		2023	0.00000
		2024	0.00000
8	HRUM	2019	0.00011
		2020	0.00011
		2021	0.00011
		2022	0.00013
		2023	0.00015
		2024	0.00018
9	ITMG	2019	0.00001
		2020	0.00001
		2021	0.00002
		2022	0.00001
		2023	0.00001
		2024	0.00001
10	MBAP	2019	0.00165
		2020	0.00278
		2021	0.00278
		2022	0.00293
		2023	0.00293
		2024	0.00293
11	MYOH	2019	0.00000
		2020	0.00000
		2021	0.00000
		2022	0.00000
		2023	0.00000
		2024	0.00000
12	PSSI	2019	0.00096
		2020	0.00282
		2021	0.00268
		2022	0.00255
		2023	0.00258
		2024	0.00006
13	PTBA	2019	0.00001
		2020	0.00002
		2021	0.00000

		2022	0.00000
		2023	0.00000
		2024	0.00000
14	PTIS	2019	0.00145
		2020	0.00145
		2021	0.00145
		2022	0.00145
		2023	0.00145
		2024	0.00145
15	PTRO	2019	0.00000
		2020	0.00000
		2021	0.00000
		2022	0.00000
		2023	0.00000
		2024	0.00000
16	RAJA	2019	0.00000
		2020	0.00000
		2021	0.00000
		2022	0.00000
		2023	0.00000
		2024	0.00000
17	RUIS	2019	0.00000
		2020	0.00000
		2021	0.00000
		2022	0.00000
		2023	0.00000
		2024	0.00000
18	SHIP	2019	0.00085
		2020	0.00077
		2021	0.00077
		2022	0.00077
		2023	0.00077
		2024	0.00077
19	SOCI	2019	0.01700
		2020	0.01700
		2021	0.01700
		2022	0.01700
		2023	0.01700
		2024	0.01700
20	TCPI	2019	0.00000

		2020	0.04000
		2021	0.00800
		2022	0.00000
		2023	0.00000
		2024	0.00000
21	TPMA	2019	0.00000
		2020	0.00000
		2021	0.00000
		2022	0.00000
		2023	0.00000
		2024	0.05060
22	TOBA	2019	0.00000
		2020	0.00000
		2021	0.00000
		2022	0.00200
		2023	0.00615
		2024	0.01270

Lampiran 6. Variabel Capital Intensity

No.	Kode	Tahun	Aset Tetap	Total Aset	<i>Capital Intensity</i>
1	ADRO	2019	1,722,413	7,217,105	0.2387
		2020	1,539,435	6,381,566	0.2412
		2021	1,397,105	7,586,936	0.1841
		2022	1,451,993	10,782,307	0.1347
		2023	1,754,405	10,472,711	0.1675
		2024	1,529,381	6,702,127	0.2282
2	AKRA	2019	383,078	1,540,108	0.2487
		2020	363,426	1,324,606	0.2744
		2021	348,895	1,647,528	0.2118
		2022	317,634	1,728,282	0.1838
		2023	354,596	1,962,547	0.1807
		2024	393,826	2,048,551	0.1922
3	BSSR	2019	61,167	250,680	0.2440
		2020	57,067	263,344	0.2167
		2021	61,072	435,317	0.1403
		2022	71,079	404,831	0.1756
		2023	72,036	408,454	0.1764
		2024	71,116	383,119	0.1856
4	BYAN	2019	330,906	1,278,040	0.2589
		2020	326,708	1,619,725	0.2017
		2021	424,546	2,433,712	0.1744
		2022	564,693	3,945,459	0.1431
		2023	718,144	3,444,320	0.2085
		2024	797,637	3,521,456	0.2265
5	ELSA	2019	130,877	489,536	0.2673
		2020	128,464	536,180	0.2396

		2021	126,955	507,033	0.2504
		2022	109,006	561,699	0.1941
		2023	122,547	622,826	0.1968
		2024	119,673	657,610	0.1820
6	ENRG	2019	0	679,370	0.0000
		2020	847	844,618	0.0010
		2021	2,456	1,064,043	0.0023
		2022	4,608	1,194,330	0.0039
		2023	5,099	1,368,757	0.0037
		2024	71,265	1,583,259	0.0450
7	GEMS	2019	84,856	780,646	0.1087
		2020	81,423	813,718	0.1001
		2021	79,083	829,027	0.0954
		2022	78,969	1,129,087	0.0699
		2023	103,928	1,312,042	0.0792
		2024	109,889	1,239,572	0.0887
8	HRUM	2019	74,909	447,002	0.1676
		2020	67,423	498,702	0.1352
		2021	58,747	874,658	0.0672
		2022	51,857	1,278,806	0.0406
		2023	169,237	1,633,107	0.1036
		2024	976,192	2,574,539	0.3792
9	ITMG	2019	222,805	1,209,041	0.1843
		2020	195,849	1,158,629	0.1690
		2021	165,765	1,666,239	0.0995
		2022	151,346	2,640,177	0.0573
		2023	168,022	2,187,847	0.0768
		2024	177,699	2,406,544	0.0738
10	MBAP	2019	29,844	192,527	0.1550
		2020	23,422	181,973	0.1287

		2021	18,998	257,720	0.0737
		2022	15,462	306,548	0.0504
		2023	13,495	229,501	0.0588
		2024	32,469	237,186	0.1369
11	MYOH	2019	42,885	160,182	0.2677
		2020	32,656	151,109	0.2161
		2021	26,704	163,970	0.1629
		2022	23,504	169,488	0.1387
		2023	58,880	236,712	0.2487
		2024	47,267	224,114	0.2109
12	PSSI	2019	112,354	143,198	0.7846
		2020	108,040	146,836	0.7358
		2021	100,517	161,236	0.6234
		2022	100,941	179,354	0.5628
		2023	99,525	203,872	0.4882
		2024	75,784	189,561	0.3998
13	PTBA	2019	523,182	1,877,422	0.2787
		2020	557,505	1,705,547	0.3269
		2021	583,168	2,531,620	0.2304
		2022	534,616	2,883,428	0.1854
		2023	555,670	2,514,608	0.2210
		2024	540,509	2,585,421	0.2091
14	PTIS	2019	30,206	36,115	0.8364
		2020	27,819	35,341	0.7872
		2021	27,945	36,855	0.7582
		2022	31,186	41,704	0.7478
		2023	24,895	37,747	0.6595
		2024	21,747	32,884	0.6613
15	PTRO	2019	312,538	551,044	0.5672
		2020	231,400	529,688	0.4369

		2021	229,155	532,736	0.4301
		2022	232,812	596,420	0.3903
		2023	230,746	727,945	0.3170
		2024	330,167	867,265	0.3807
16	RAJA	2019	57,799	180,440	0.3203
		2020	52,887	166,644	0.3174
		2021	124,913	245,586	0.5086
		2022	143,393	260,504	0.5504
		2023	170,935	328,648	0.5201
		2024	167,905	331,351	0.5067
17	RUIS	2019	34,995	90,019	0.3888
		2020	37,471	95,367	0.3929
		2021	30,703	90,880	0.3378
		2022	22,001	80,577	0.2730
		2023	17,823	87,035	0.2048
		2024	12,744	86,696	0.1470
18	SHIP	2019	204,651	239,824	0.8533
		2020	218,124	294,564	0.7405
		2021	257,166	325,466	0.7901
		2022	311,195	379,305	0.8204
		2023	359,015	432,181	0.8307
		2024	376,058	483,419	0.7779
19	SOCI	2019	563,332	688,216	0.8185
		2020	538,329	659,557	0.8162
		2021	505,076	629,210	0.8027
		2022	533,331	633,960	0.8413
		2023	510,004	604,304	0.8440
		2024	520,700	602,682	0.8640
20	TCPI	2019	143,448	221,389	0.6479
		2020	132,199	195,123	0.6775

		2021	138,101	199,544	0.6921
		2022	124,522	178,620	0.6971
		2023	170,319	227,637	0.7482
		2024	153,294	227,955	0.6725
21	TPMA	2019	91,236	111,636	0.8173
		2020	83,258	103,761	0.8024
		2021	77,642	99,256	0.7822
		2022	71,476	107,381	0.6656
		2023	118,180	192,957	0.6125
		2024	163,006	247,912	0.6575
22	TOBA	2019	37,415	634,640	0.0590
		2020	32,102	771,872	0.0416
		2021	26,668	858,102	0.0311
		2022	25,408	899,330	0.0283
		2023	35,577	947,838	0.0375
		2024	33,649	893,736	0.0376

Lampiran 7. Variabel Tax Avoidance

No.	Kode	Tahun	Beban Pajak	Laba sebelum Pajak	ETR
1	ADRO	2019	224,101	659,103	0.3400
		2020	63,660	222,165	0.2865
		2021	457,658	1,486,251	0.3079
		2022	1,645,096	4,476,219	0.3675
		2023	439,405	2,294,283	0.1915
		2024	376,538	1,959,059	0.1922
2	AKRA	2019	11,933	62,253	0.1917
		2020	16,286	84,489	0.1928
		2021	18,226	97,769	0.1864
		2022	34,630	192,220	0.1802
		2023	38,219	237,912	0.1606
		2024	25,547	174,010	0.1468
3	BSSR	2019	10,849	41,316	0.2626
		2020	10,319	40,839	0.2527
		2021	59,044	264,208	0.2235
		2022	68,886	308,782	0.2231
		2023	58,320	220,590	0.2644
		2024	40,078	171,630	0.2335
4	BYAN	2019	77,414	311,625	0.2484
		2020	82,176	426,636	0.1926
		2021	361,616	1,627,573	0.2222
		2022	643,704	2,945,310	0.2186
		2023	353,387	1,632,968	0.2164
		2024	262,147	1,205,522	0.2175
5	ELSA	2019	7,933	33,577	0.2363
		2020	6,791	24,451	0.2778
		2021	6,578	14,207	0.4630

		2022	5,028	29,061	0.1730
		2023	7,443	40,080	0.1857
		2024	10,358	54,515	0.1900
6	ENRG	2019	64,044	88,571	0.7231
		2020	50,161	108,754	0.4612
		2021	90,408	130,092	0.6950
		2022	73,623	140,359	0.5245
		2023	33,123	101,298	0.3270
		2024	21,940	94,903	0.2312
7	GEMS	2019	33,574	100,340	0.3346
		2020	31,276	127,132	0.2460
		2021	106,817	460,841	0.2318
		2022	202,785	898,693	0.2256
		2023	154,233	682,984	0.2258
		2024	152,629	635,760	0.2401
8	HRUM	2019	5,505	25,628	0.2148
		2020	3,879	64,171	0.0604
		2021	29,090	127,569	0.2280
		2022	97,775	477,548	0.2047
		2023	67,328	263,000	0.2560
		2024	37,446	115,105	0.3253
9	ITMG	2019	59,406	185,908	0.3195
		2020	34,725	72,553	0.4786
		2021	145,699	621,269	0.2345
		2022	345,447	1,544,792	0.2236
		2023	144,492	644,112	0.2243
		2024	119,220	494,821	0.2409
10	MBAP	2019	13,151	48,439	0.2715
		2020	9,906	37,373	0.2651
		2021	28,331	128,897	0.2198

		2022	51,263	230,655	0.2222
		2023	9,047	30,734	0.2944
		2024	5,732	24,877	0.2304
11	MYOH	2019	8,827	34,925	0.2527
		2020	6,476	29,009	0.2232
		2021	7,640	34,596	0.2208
		2022	4,597	18,698	0.2459
		2023	4,105	22,600	0.1816
		2024	6,129	22,327	0.2745
12	PSSI	2019	-703	12,585	-0.0559
		2020	-1,364	7,066	-0.1930
		2021	2,683	27,725	0.0968
		2022	4,496	46,828	0.0960
		2023	5,102	45,993	0.1109
		2024	2,307	16,630	0.1387
13	PTBA	2019	101,775	392,429	0.2593
		2020	58,402	229,116	0.2549
		2021	162,715	725,956	0.2241
		2022	217,589	1,029,961	0.2113
		2023	120,770	528,951	0.2283
		2024	69,287	387,282	0.1789
14	PTIS	2019	50	270	0.1852
		2020	13	17	0.7647
		2021	-82	42	-1.9524
		2022	39	575	0.0678
		2023	-185	837	-0.2210
		2024	534	655	0.8153
15	PTRO	2019	9,257	40,581	0.2281
		2020	3,038	35,536	0.0855
		2021	7,381	41,334	0.1786

		2022	8,989	50,155	0.1792
		2023	3,609	16,047	0.2249
		2024	-2,084	7,868	-0.2649
16	RAJA	2019	2,711	9,048	0.2996
		2020	1,961	4,484	0.4373
		2021	1,255	4,651	0.2698
		2022	2,184	13,024	0.1677
		2023	13,497	40,646	0.3321
		2024	16,692	44,219	0.3775
17	RUIS	2019	1,264	3,644	0.3468
		2020	1,456	3,409	0.4272
		2021	1,001	2,270	0.4408
		2022	1,188	2,466	0.4816
		2023	1,136	2,057	0.5525
		2024	896	1,720	0.5209
18	SHIP	2019	2,870	22,397	0.1281
		2020	3,240	26,085	0.1242
		2021	3,390	24,384	0.1390
		2022	3,327	29,445	0.1130
		2023	3,535	29,298	0.1207
		2024	3,433	27,557	0.1246
19	SOCI	2019	3,688	13,037	0.2829
		2020	3,914	31,193	0.1255
		2021	2,295	7,727	0.2970
		2022	2,303	8,783	0.2622
		2023	1,970	10,901	0.1807
		2024	1,994	19,136	0.1042
20	TCPI	2019	33	19,419	0.0017
		2020	11	4,104	0.0027
		2021	58	5,986	0.0098

		2022	66	7,418	0.0088
		2023	67	12,306	0.0054
		2024	241	5,760	0.0419
21	TPMA	2019	573	8,812	0.0650
		2020	477	2,562	0.1862
		2021	508	4,467	0.1137
		2022	756	15,052	0.0502
		2023	1,334	35,064	0.0380
		2024	1,428	34,157	0.0418
22	TOBA	2019	19,124	62,870	0.3042
		2020	6,279	42,083	0.1492
		2021	20,865	86,472	0.2413
		2022	20,800	114,685	0.1814
		2023	12,005	32,852	0.3654
		2024	12,902	60,878	0.2119

Lampiran 8. Variabel Penelitian

No.	Kode	Tahun	KOMIN	KOMAU	KEPIN	KEMEN	CI	ETR
1	ADRO	2019	0.400	3.00	0.7963	0.0632	0.2387	0.340
		2020	0.400	3.00	0.7824	0.0631	0.2412	0.287
		2021	0.400	3.00	0.8069	0.0630	0.1841	0.308
		2022	0.400	3.00	0.7982	0.0629	0.1347	0.368
		2023	0.400	3.00	0.7837	0.0629	0.1675	0.192
		2024	0.400	3.00	0.7743	0.0651	0.2282	0.192
2	AKRA	2019	0.333	3.00	0.9602	0.0068	0.2487	0.192
		2020	0.333	3.00	0.9340	0.0040	0.2744	0.193
		2021	0.333	3.00	0.9538	0.0089	0.2118	0.186
		2022	0.333	3.00	0.9623	0.0110	0.1838	0.180
		2023	0.333	3.00	0.9563	0.0124	0.1807	0.161
		2024	0.333	3.00	0.9514	0.0128	0.1922	0.147
3	BSSR	2019	0.375	3.00	0.9507	0.0010	0.2440	0.263
		2020	0.375	3.00	0.9507	0.0010	0.2167	0.253
		2021	0.375	3.00	0.9508	0.0000	0.1403	0.223
		2022	0.375	3.00	0.9313	0.0000	0.1756	0.223
		2023	0.375	3.00	0.9299	0.0000	0.1764	0.264
		2024	0.375	2.00	0.9273	0.0000	0.1856	0.234
4	BYAN	2019	0.400	4.00	0.3000	0.5971	0.2589	0.248
		2020	0.400	4.00	0.3000	0.5987	0.2017	0.193
		2021	0.500	4.00	0.1000	0.6147	0.1744	0.222
		2022	0.500	4.00	0.1000	0.6740	0.1431	0.219
		2023	0.500	5.00	0.1000	0.6756	0.2085	0.216
		2024	0.500	5.00	0.1000	0.4667	0.2265	0.217
5	ELSA	2019	0.400	3.00	0.8090	0.0000	0.2673	0.236
		2020	0.500	3.00	0.7130	0.0000	0.2396	0.278
		2021	0.500	3.00	0.6100	0.0000	0.2504	0.463
		2022	0.500	3.00	0.6660	0.0000	0.1941	0.173
		2023	0.500	3.00	0.6930	0.0000	0.1968	0.186
		2024	0.500	3.00	0.7530	0.0000	0.1820	0.190
6	ENRG	2019	0.600	3.00	0.5032	0.0000	0.0000	0.723
		2020	0.600	3.00	0.6113	0.0000	0.0010	0.461
		2021	0.400	3.00	0.8064	0.0000	0.0023	0.695
		2022	0.400	3.00	0.8799	0.0000	0.0039	0.525
		2023	0.333	3.00	0.8801	0.0000	0.0037	0.327
		2024	0.333	3.00	0.8733	0.0000	0.0450	0.231
7	GEMS	2019	0.500	3.00	0.9988	0.0000	0.1087	0.335
		2020	0.400	3.00	0.9988	0.0000	0.1001	0.246
		2021	0.500	3.00	0.9990	0.0000	0.0954	0.232

		2022	0.333	3.00	0.9983	0.0000	0.0699	0.226
		2023	0.333	3.00	0.9950	0.0000	0.0792	0.226
		2024	0.333	3.00	0.9960	0.0000	0.0887	0.240
8	HRUM	2019	0.333	3.00	0.9100	0.0001	0.1676	0.215
		2020	0.333	3.00	0.9288	0.0001	0.1352	0.060
		2021	0.400	3.00	0.9471	0.0001	0.0672	0.228
		2022	0.400	3.00	0.9193	0.0001	0.0406	0.205
		2023	0.400	3.00	0.9316	0.0001	0.1036	0.256
		2024	0.400	3.00	0.9230	0.0002	0.3792	0.325
9	ITMG	2019	0.500	4.00	0.9071	0.0000	0.1843	0.320
		2020	0.429	4.00	0.8368	0.0000	0.1690	0.479
		2021	0.429	4.00	0.8843	0.0000	0.0995	0.235
		2022	0.375	4.00	0.8815	0.0000	0.0573	0.224
		2023	0.375	4.00	0.8555	0.0000	0.0768	0.224
		2024	0.300	4.00	0.8623	0.0000	0.0738	0.241
10	MBAP	2019	0.333	3.00	0.9429	0.0017	0.1550	0.271
		2020	0.333	3.00	0.9434	0.0028	0.1287	0.265
		2021	0.333	3.00	0.9455	0.0028	0.0737	0.220
		2022	0.500	3.00	0.9463	0.0029	0.0504	0.222
		2023	0.500	3.00	0.9480	0.0029	0.0588	0.294
		2024	0.500	3.00	0.9466	0.0029	0.1369	0.230
11	MYOH	2019	0.333	3.00	0.7972	0.0000	0.2677	0.253
		2020	0.333	3.00	0.8063	0.0000	0.2161	0.223
		2021	0.333	3.00	0.8129	0.0000	0.1629	0.221
		2022	0.333	3.00	0.8150	0.0000	0.1387	0.246
		2023	0.333	3.00	0.8150	0.0000	0.2487	0.182
		2024	0.500	3.00	0.8077	0.0000	0.2109	0.275
12	PSSI	2019	0.250	3.00	0.9620	0.0010	0.7846	-0.056
		2020	0.250	3.00	0.9617	0.0028	0.7358	-0.193
		2021	0.200	3.00	0.9767	0.0027	0.6234	0.097
		2022	0.333	3.00	0.9773	0.0025	0.5628	0.096
		2023	0.333	3.00	0.9784	0.0026	0.4882	0.111
		2024	0.500	3.00	0.9775	0.0001	0.3998	0.139
13	PTBA	2019	0.333	4.00	0.9451	0.0000	0.2787	0.259
		2020	0.333	4.00	0.9041	0.0000	0.3269	0.255
		2021	0.333	4.00	0.8918	0.0000	0.2304	0.224
		2022	0.333	4.00	0.8972	0.0000	0.1854	0.211
		2023	0.500	4.00	0.8938	0.0000	0.2210	0.228
		2024	0.500	4.00	0.8694	0.0000	0.2091	0.179
14	PTIS	2019	0.500	3.00	0.9105	0.0015	0.8364	0.185
		2020	0.500	3.00	0.9101	0.0015	0.7872	0.765
		2021	0.500	3.00	0.9164	0.0015	0.7582	-1.952

		2022	0.500	3.00	0.9107	0.0015	0.7478	0.068
		2023	0.500	3.00	0.9107	0.0015	0.6595	-0.221
		2024	0.500	3.00	0.9090	0.0015	0.6613	0.815
15	PTRO	2019	0.400	3.00	0.7415	0.0000	0.5672	0.228
		2020	0.400	5.00	0.7450	0.0000	0.4369	0.085
		2021	0.400	5.00	0.7479	0.0000	0.4301	0.179
		2022	0.444	6.00	0.9357	0.0000	0.3903	0.179
		2023	0.333	4.00	0.9198	0.0000	0.3170	0.225
		2024	0.333	4.00	0.8803	0.0000	0.3807	-0.265
16	RAJA	2019	0.250	3.00	0.4319	0.0000	0.3203	0.300
		2020	0.250	3.00	0.4084	0.0000	0.3174	0.437
		2021	0.250	3.00	0.3656	0.0000	0.5086	0.270
		2022	0.333	3.00	0.5723	0.0000	0.5504	0.168
		2023	0.600	3.00	0.6399	0.0000	0.5201	0.332
		2024	0.600	4.00	0.6174	0.0000	0.5067	0.377
17	RUIS	2019	0.333	3.00	0.0406	0.0000	0.3888	0.347
		2020	0.333	3.00	0.5726	0.0000	0.3929	0.427
		2021	0.333	3.00	0.5714	0.0000	0.3378	0.441
		2022	0.333	3.00	0.5747	0.0000	0.2730	0.482
		2023	0.333	3.00	0.5727	0.0000	0.2048	0.552
		2024	0.333	3.00	0.5622	0.0000	0.1470	0.521
18	SHIP	2019	0.500	3.00	0.9917	0.0009	0.8533	0.128
		2020	0.500	3.00	0.9917	0.0008	0.7405	0.124
		2021	0.500	3.00	0.9884	0.0008	0.7901	0.139
		2022	0.500	3.00	0.9892	0.0008	0.8204	0.113
		2023	0.500	3.00	0.9926	0.0008	0.8307	0.121
		2024	0.333	3.00	0.9927	0.0008	0.7779	0.125
19	SOCI	2019	0.333	3.00	0.8118	0.0170	0.8185	0.283
		2020	0.333	3.00	0.8120	0.0170	0.8162	0.125
		2021	0.500	3.00	0.8073	0.0170	0.8027	0.297
		2022	0.500	3.00	0.8120	0.0170	0.8413	0.262
		2023	0.500	3.00	0.8179	0.0170	0.8440	0.181
		2024	0.500	3.00	0.8436	0.0170	0.8640	0.104
20	TCPI	2019	0.500	3.00	0.8589	0.0000	0.6479	0.002
		2020	0.500	3.00	0.8672	0.0400	0.6775	0.003
		2021	0.500	3.00	0.8982	0.0080	0.6921	0.010
		2022	0.500	3.00	0.8595	0.0000	0.6971	0.009
		2023	0.500	3.00	0.8833	0.0000	0.7482	0.005
		2024	0.500	3.00	0.8971	0.0000	0.6725	0.042
21	TPMA	2019	0.333	3.00	0.9457	0.0000	0.8173	0.065
		2020	0.333	3.00	0.9510	0.0000	0.8024	0.186
		2021	0.333	3.00	0.8624	0.0000	0.7822	0.114

		2022	0.500	3.00	0.8307	0.0000	0.6656	0.050
		2023	0.500	3.00	0.8125	0.0000	0.6125	0.038
		2024	0.500	3.00	0.7117	0.0506	0.6575	0.042
22	TOBA	2019	0.667	3.00	0.9552	0.0000	0.0590	0.304
		2020	0.667	3.00	0.9553	0.0000	0.0416	0.149
		2021	0.800	3.00	0.9573	0.0000	0.0311	0.241
		2022	0.800	3.00	0.9146	0.0020	0.0283	0.181
		2023	0.800	3.00	0.8343	0.0061	0.0375	0.365
		2024	0.800	3.00	0.8360	0.0127	0.0376	0.212

Lampiran 9. Hasil Olah Data

9.1 Statistik Deskriptif

	KOMIN	KOMAU	KEPIN	KEMEN	CI	ETR
Mean	0.424788	3.219697	0.814264	0.032792	0.342139	0.211689
Median	0.400000	3.000000	0.882400	0.000000	0.234550	0.223000
Maximum	0.800000	6.000000	0.999000	0.675600	0.864000	0.815000
Minimum	0.200000	2.000000	0.040600	0.000000	0.000000	-1.952000
Std. Dev.	0.112268	0.543025	0.206772	0.126923	0.269251	0.247897
Skewness	1.114321	2.399429	-2.066161	4.367714	0.664860	-4.839459
Kurtosis	4.929509	9.681418	7.121158	20.56918	2.003599	45.74994
Jarque-Bera	47.79419	372.1872	187.3301	2117.412	15.18534	10566.81
Probability	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000504	0.000000
Sum	56.07200	425.0000	107.4828	4.328600	45.16240	27.94300
Sum Sq. Dev.	1.651128	38.62879	5.600839	2.110330	9.497002	8.050318
Observations	132	132	132	132	132	132

9.2 Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: Untitled

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	0.584602	(21,105)	0.9209
Cross-section Chi-square	14.595937	21	0.8427

9.3 Uji Lagrange Multiplier

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects

Null hypotheses: No effects

Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided
(all others) alternatives

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	2.971248 (0.0848)	0.698769 (0.4032)	3.670017 (0.0554)
Honda	-1.723731 (0.9576)	-0.835924 (0.7984)	-1.809949 (0.9648)
King-Wu	-1.723731 (0.9576)	-0.835924 (0.7984)	-1.507165 (0.9341)
Standardized Honda	-1.124610 (0.8696)	-0.632068 (0.7363)	-5.586101 (1.0000)
Standardized King-Wu	-1.124610 (0.8696)	-0.632068 (0.7363)	-4.594122 (1.0000)
Gourieroux, et al.	--	--	0.000000 (1.0000)

9.4 Analisis Regresi

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.742995	0.191582	3.878202	0.0002
KOMIN	0.012243	0.178860	0.068453	0.9455
KOMAU	-0.022621	0.040712	-0.555635	0.5794
KEPIN	-0.418772	0.132502	-3.160497	0.0020
KEMEN	-0.485666	0.227638	-2.133507	0.0348
CI	-0.312007	0.074878	-4.166845	0.0001

9.5 Uji Multikolinearitas

	KOMIN	KOMAU	KEPIN	KEMEN	CI
KOMIN	1.000000	0.005528	-0.011513	0.082978	-0.028651
KOMAU	0.005528	1.000000	-0.306048	0.422882	-0.116896
KEPIN	-0.011513	-0.306048	1.000000	-0.682977	0.100434
KEMEN	0.082978	0.422882	-0.682977	1.000000	-0.110880
CI	-0.028651	-0.116896	0.100434	-0.110880	1.000000

9.6 Uji Heteroskedastisitas

Dependent Variable: ABS(RESID)
Method: Panel Least Squares
Date: 07/28/25 Time: 13:02
Sample: 2019 2024
Periods included: 6
Cross-sections included: 22
Total panel (balanced) observations: 132

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.028809	0.161708	0.178156	0.8589
KOMIN	0.220948	0.150969	1.463535	0.1458
KOMAU	-0.004858	0.034364	-0.141360	0.8878
KEPIN	-0.078718	0.111840	-0.703847	0.4828
KEMEN	-0.161217	0.192141	-0.839055	0.4030
CI	0.193810	0.063202	3.066505	0.0027
R-squared	0.090120	Mean dependent var	0.103955	
Adjusted R-squared	0.054013	S.D. dependent var	0.198225	
S.E. of regression	0.192797	Akaike info criterion	-0.409965	
Sum squared resid	4.683522	Schwarz criterion	-0.278929	
Log likelihood	33.05772	Hannan-Quinn criter.	-0.356718	
F-statistic	2.495951	Durbin-Watson stat	1.812374	
Prob(F-statistic)	0.034249			

9.7 Uji Hipotesis

Dependent Variable: ETR

Method: Panel Least Squares

Date: 07/28/25 Time: 11:24

Sample: 2019 2024

Periods included: 6

Cross-sections included: 22

Total panel (balanced) observations: 132

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.742995	0.191582	3.878202	0.0002
KOMIN	0.012243	0.178860	0.068453	0.9455
KOMAU	-0.022621	0.040712	-0.555635	0.5794
KEPIN	-0.418772	0.132502	-3.160497	0.0020
KEMEN	-0.485666	0.227638	-2.133507	0.0348
CI	-0.312007	0.074878	-4.166845	0.0001
R-squared	0.183402	Mean dependent var	0.211689	
Adjusted R-squared	0.150997	S.D. dependent var	0.247897	
S.E. of regression	0.228415	Akaike info criterion	-0.070912	
Sum squared resid	6.573875	Schwarz criterion	0.060124	
Log likelihood	10.68021	Hannan-Quinn criter.	-0.017665	
F-statistic	5.659730	Durbin-Watson stat	2.580668	
Prob(F-statistic)	0.000096			